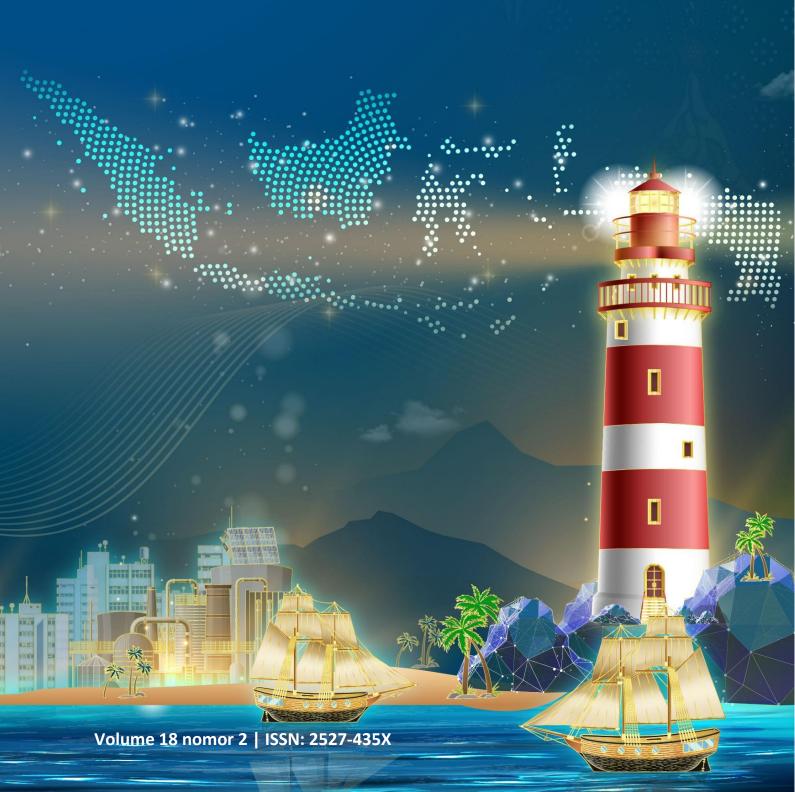


KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

# LAPORAN NUSANTARA

**APRIL 2023** 



Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

# LAPORAN NUSANTARA

APRIL 2023

#### **DAFTAR ISI DAFTAR ISI** iii **PRAKATA** ٧ **BAGIAN I** 1 Ringkasan Eksekutif 3 **BAGIAN II** Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah 15 **BOKS 1** Momentum Keketuaan ASEAN 2023 dalam Memperkuat Perekonomian dan Stabilisasi Inflasi Jawa **BAGIAN III** 19

**BOKS 2** 

Isu Strategis: Penguatan Digitalisasi Pembayaran pada Program Pemerintah

29

untuk Ketahanan dan Efisiensi Ekonomi Nasional

Pengembangan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik



# **Prakata**

erbagai aspek dalam perekonomian, termasuk dari perspektif kewilayahan, menjadi pertimbangan penting dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia. Publikasi Laporan Nusantara ini merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian dalam perspektif spasial yang disarikan dari hasil pembahasan yang komprehensif antara Dewan Gubernur dengan seluruh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. As esmen perekonomian spasial dalam publikasi ini didasarkan pada perkembangan perekonomian di Iima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

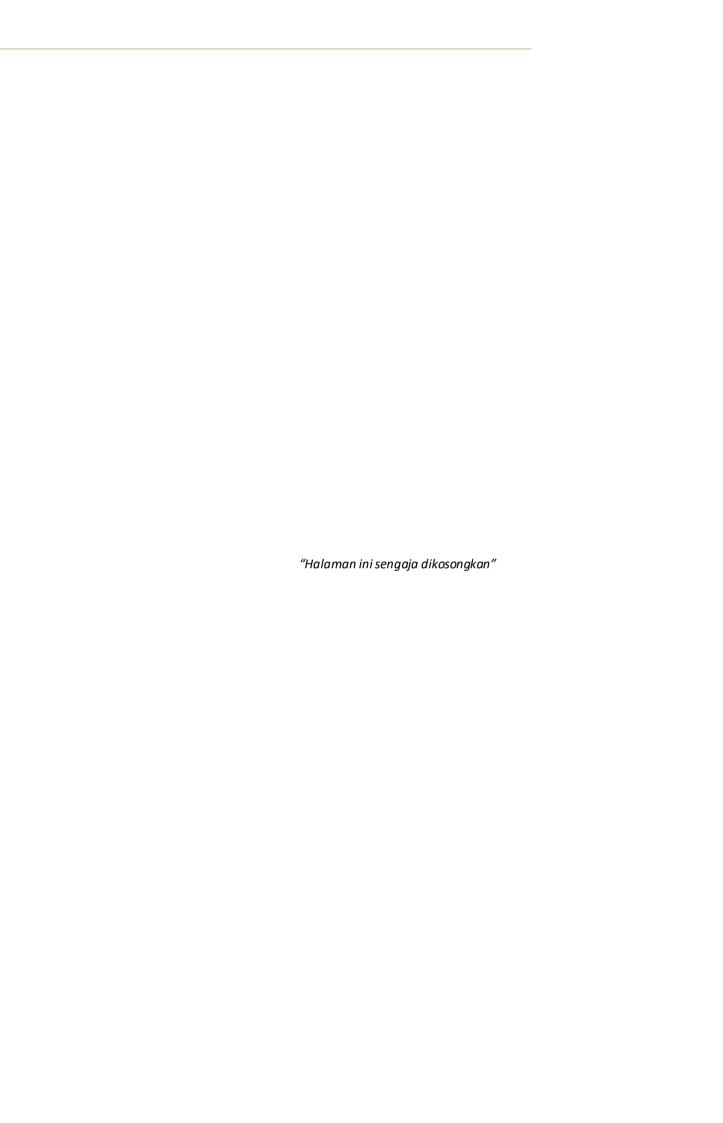
Laporan Nusantara dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika terkini dan prospek perekonomian daerah, termasuk mengupas perekonomian wilayah di tengah mengemukanya tantangan global maupun domestik. Perekonomian 2023 dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang mengemuka yaitu mencakup prospek dan ketahanan lapangan usaha (LU), implementasi digitalisasi pembayaran, upaya pengendalian inflasi dalam jangka pendek maupun panjang, serta pemulihan pariwisata. Publikasi Laporan Nusantara edisi ini juga secara khusus mengangkat isu strategis mengenai "Penguatan Digitalisasi Pembayaran pada Program Pemerintah untuk Ketahanan dan Efisiensi Ekonomi Nasional". Upaya untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi ekonomi melalui digitalisasi pembayaran di tengah dinamika domestik dan global perlu didukung sinergi bersama Pemerintah dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sebagai penutup, kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah, sebagai salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi daerah, serta memberikan informasi spasial bagi masyarakat Indonesia. Harapan tersebut kami visualisasikan pada sampul Laporan Nusantara melalui mercu suar sebagai simbol proses navigasi dalam mendukung penguatan struktur ekonomi, dengan sentuhan motif batik Sidomukti Ornamen Meru yang melambangkan keteguhan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya Laporan Nusantara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita bersama untuk berkarya demi nusa dan bangsa, membangun untuk Indonesia Maju.

Jakarta, 18 April 2023

Departemen Kebijakan Ekonomidan Moneter

Solikin M. Juhro
Direktur Eksekutif



#### **BAGIAN 1**

# Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah diprakirakan meski tertahan pada awal Perkembangan tersebut terutama ditopang meningkatnya aktivitas ekonomi domestik di tengah berlanjutnya dinamika global. Kasus COVID-19 di seluruh wilayah terkendali seiring berlanjutnya akselerasi vaksinasi dan program booster sehingga mendorong peningkatan mobilitas. Konsumsi domestik lebih baik pada triwulan I dibandingkan triwulan sebelumnya didukung keyakinan konsumen dan penjualan retail yang tetap kuat. Perbaikan konsumsi juga didukung stimulus fiskal di daerah pada triwulan I 2023 yang diprakirakan tumbuh lebih lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja investasi triwulan I 2023 pun diprakirakan membaik dari triwulan sebelumnya sejalan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah wilayah yang sempat tertunda di 2022, implementasi hilirisasi, serta pembangunan proyek pendukung ASEAN Summit. Adapun sejumlah tantangan seperti curah hujan yang tinggi serta kendala pengadaan lahan dan perizinan mewarnai perkembangan investasi bangunan pada triwulan I 2023. Di sisi lain, investasi nonbangunan diprakirakan tumbuh lebih terbatas pada triwulan I 2022, terindikasi dari kinerja impor barang modal. Sementara itu, tekanan global mereda, didukung penurunan disrupsi suplai global dan perbaikan perekonomian Tiongkok. Perkembangan tersebut diprakirakan mendorong harga komoditas tetap tinggi, di tengah proses disinflasi global yang lebih lambat dari prakiraan sehingga mendorong berlanjutnya kebijakan moneter ketat negara maju pada 2023. Dengan perkembangan tersebut, kinerja ekspor masih menjadi penopang pertumbuhan wilayah didukung potensi dampak reopening ekonomi Tiongkok ke kinerja ekspor produk utama Indonesia. Secara spasial, kinerja ekspor masih menopang kinerja lapangan usaha (LU) tradeable di berbagai wilayah, khususnya LU Pertambangan di Kalimantan, serta LU Industri Pengolahan di Sumatera.

Permintaan domestik menopang proses perbaikan LU di tengah tetap terjaganya ekspor. Kinerja LU Perdagangan diprakirakan meningkat pada triwulan I 2023 seiring semakin tingginya mobilitas sehingga mendorong perbaikan permintaan domestik, tercermin dari indikator penjualan eceran dan pendapatan yang tetap kuat di sebagian besar wilayah. Hal ini juga didukung oleh tekanan inflasi yang mereda. Sejalan dengan LU Perdagangan, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan I 2023 diprakirakan lebih tinggi ditopang oleh pertumbuhan transportasi barang di tengah normalisasi jumlah

penumpang pasca Natal dan Tahun Baru. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) juga tetap kuat kendati mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Peningkatan mobilitas khususnya aktivitas pariwisata di berbagai daerah serta penyelenggaraan event/MICE internasional, diantaranya penyelenggaraan ASEAN 2023 menopang kinerja LU Akmamin. Seiring perbaikan permintaan domestik, kapasitas produksi LU Industri Pengolahan terindikasi meningkat khususnya yang berorientasi domestik. Di sisi lain, prospek perekonomian global memengaruhi kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertambangan yang diprakirakan tertahan pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. Produksi tembaga di Sulampua diprakirakan menurun seiring tertahannya pertumbuhan kapasitas produksi, dengan kinerja ekspor yang masih positif. Sementara itu, kinerja pertambangan nikel juga dipengaruhi maintenance pada beberapa line smelter. Adapun pertumbuhan tahunan produksi batubara di Sumatera dan Kalimantan diprakirakan cukup tinggi didukung permintaan negara mitra dagang utama yang masih terjaga serta permintaan domestik yang tetap kuat. Selain itu, Kinerja LU Pertanian diprakirakan menurun di hampir seluruh wilayah seiring pola musiman. Produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit memasuki low season akibat musim trek di Sumatera, sementara produksi wilayah Kalimantan tertahan sesuai pola tahunannya. Produksi hortikultura diprakirakan menurun seiring periode musim tanam di tengah curah hujan yang relatif tinggi pada awal tahun.

Perbaikan ekonomi untuk keseluruhan 2023 diprakirakan lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Perkembangan berbagai indikator dini konsumsi meningkat, didukung terjaganya daya beli seiring meredanya dampak rambatan kenaikan harga energi. Tekanan inflasi diprakirakan terkendali, kembali pada kisaran sasaran 3+1% pada semester II 2023. Sementara itu, prospek investasi lebih baik dari 2022 meski tidak sekuat prakiraan sebelumnya dipengaruhi sejumlah kendala yang memengaruhi penyelesaian proyek. Kapasitas fiskal daerah 2023 diprakirakan meningkat dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dapat lebih dioptimalkan. Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan untuk mendukung perbaikan ekonomi serta upaya pengendalian inflasi di daerah. Dari sisi prospek kinerja ekspor, diprakirakan tetap kuat meski lebih rendah dari prakiraan sejalan perkembangan perekonomian global. Secara spasial, perbaikan kinerja ekonomi pada 2023 di sebagian wilayah diprakirakan termoderasi dibandingkan proyeksi sebelumnya seiring perlambatan kinerja eksternal. Sementara secara sektoral, sumber pemulihan LU utama untuk keseluruhan 2023 diprakirakan lebih didukung oleh permintaan domestik. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 diprakirakan bias ke atas dalam kisaran proyeksi 4,5-5,3%.

Ke depan, proses pemulihan dan perbaikan struktur ekonomi perlu terus dilanjutkan dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong berlanjutnya perbaikan ekonomi. Dinamika domestik dan global memberikan tantangan pada ketahanan ekonomi wilayah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal ketahanan dan memperkuat struktur ekonomi khususnya melalui akselerasi hilirisasi dan digitalisasi, sinergi pengendalian inflasi Pusat dan Daerah didukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), optimalisasi belanja daerah, serta penguatan kinerja pariwisata. Akselerasi hilirisasi terus diperkuat untuk mendukung peningkatan struktur ekspor yang lebih bernilai tambah. Sementara itu, sebagai salah upaya memperkuat struktur ekonomi, transformasi digital semakin terakselerasi sehingga menopang ketahanan dan efisiensi ekonomi nasional. Sinergi dengan Pemerintah juga terus dilakukan dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital (EKD), yang difokuskan pada 3 (tiga) area utama, yakni Digitalisasi Integrasi Bantuan Sosial (Bansos), Transaksi Pemerintah Daerah melalui Satgas Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), dan Transportasi (elektronifikasi pembayaran). Hal ini diulas secara khusus pada Bagian III Isu Strategis: "Penguatan Digitalisasi Pembayaran pada Program Pemerintah untuk Ketahanan dan Efisiensi Ekonomi Nasional". Selanjutnya, optimalisasi belanja APDB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda untuk mendukung perbaikan ekonomi perluterus didorong, termasuk dalam pengendalian inflasi daerah, didukung digitalisasi. Selain itu, prospek kinerja pariwisata didukung aktivitas wisnus dan wisman serta meningkatnya jumlah

Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) dan event ke depan, serta potensi reopening ekonomi Tiongkok.

Realisasi inflasi gabungan kota IHK di seluruh wilayah pada triwulan I 2023 tetap terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara nasional mencapai 4,97% (yoy) pada triwulan I 2023, menurun dari 5,51% (yoy) pada triwulan IV 2022, meski masih berada di atas rentang sasaran inflasi IHK nasional 3,0% ± 1%. Penurunan tekanan inflasi pada periode laporan terjadi di seluruh wilayah, dipengaruhi terutama oleh kelompok inti dan administered prices (AP) sejalan dengan kenaikan permintaan yang masih gradual, terkendalinya ekspektasi inflasi, harga komoditas global yang menurun, nilai tukar yang terjaga, serta kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara (AU). Sementara itu, inflasi kelompok volatile food (VF) meningkat, terutama di gabungan kota IHK wilayah Sumatera, Jawa dan Sulampua, didorong oleh permintaan yang lebih tinggi menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri serta kondisi cuaca yang kurang kondusif sehingga mengganggu kesinambungan pasokan.

Penurunan inflasi pada triwulan I 2023 tidak terlepas dari respons kebijakan moneter Bank Indonesia serta sinergi erat pengendalian inflasi dengan Pemerintah. Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah), serta mitra strategis lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) berkomitmen dalam mengendalikan inflasi melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3,0±1% sejak awal semester II 2023 terutama setelah berakhirnya base effect penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun lalu dan prospek nilai tukar yang stabil. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam pengendalian inflasi, termasuk dalam mengantisipasi periode HBKN.

#### **BAGIAN 2**

# Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah

#### Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian daerah pada triwulan I 2023 diprakirakan tetap kuat di tengah perbaikan permintaan domestik dan perlambatan ekonomi global. Mobilitas masyarakat mendukung kuatnya permintaan domestik di tengah penyebaran kasus COVID-19 yang tetap terkendali. Selain itu, sesuai dengan pola historisnya, momentum persiapan perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) juga menopang terjaganya konsumsi domestik pada triwulan I 2023. Lebih lanjut, investasi hilirisasi yang tetap kuat berpotensi mendorong kinerja ekspor meski prospek ekonomi global tertahan. Perbaikan ekonomi Tiongkok yang didukung dampak reopening Tiongkok diperkirakan dapat mendorong ekspor produk utama Indonesia terutama CPO dan batubara. Perkembangan ini diprakirakan mampu menopang kinerja lapangan usaha (LU) di berbagai wilayah, seperti LU Pertanian di Balinusra dan Sulampua, LU Pertambangan di Kalimantan dan Sumatera, serta LU Industri Pengolahan di Sumatera.

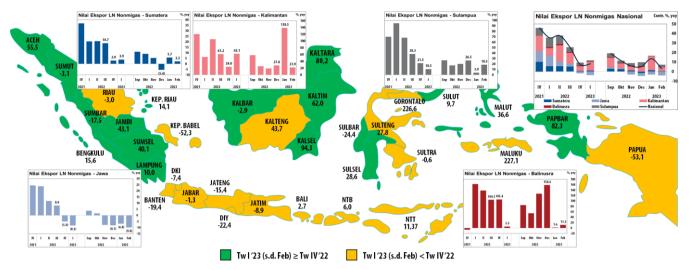
Prospek kinerja ekonomi tahun 2023 di seluruh wilayah diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya, terutama ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga. Perbaikan permintaan domestik berlanjut sejalan dengan mobilitas yang terus meningkat, didukung inflasi yang terkendali dan menuju sasaran 3,0%±1%. Sejalan dengan hal tersebut, prospek kinerja investasi pun diprakirakan tetap kuat mesti tidak setinggi prakiraan, terutama ditopang oleh peningkatan kinerja investasi bangunan sejalan dengan realisasi investasi proyek IKN, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan residensial. Di tengah perkiraan perlambatan perekonomian global, kinerja ekspor nonmigas di seluruh wilayah diprakirakan tertahan. Ekspor komoditas utama berbasis SDA, seperti CPO dan batu bara diperkirakan melambat sebagaimana perkiraan sebelumnya, namun ekspor besi baja diperkirakan lebih rendah dipengaruhi kendala delay commissioning smelter. Sejalan perkiraan tersebut, kinerja perekonomian daerah pada 2023 diprakirakan lebih tinggi dari prakiraan pada LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan untuk pasar domestik. Permintaan domestik yang terjaga juga mendorong kinerja LU Perdagangan, LU Transgud, serta LU Akmamin. Selain itu, kinerja LU Pertanian masih sejalan dengan perkiraan sebelumnya seiring cuaca yang lebih kondusif. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 diprakirakan bias ke atas dalam kisaran proyeksi 4,5-5,3%.

## Kinerja Permintaan

#### Ekspor Luar Negeri

Kinerja ekspor nonmigas pada triwulan I 2023 hingga Februari tetap kuat. Perkembangan positif tersebut terutama ditopang perbaikan ekspor batu bara dari Kalimantan dan Sumatera. Selain akibat dampak larangan ekspor batu bara tahun lalu terhadap pertumbuhan triwulan I 2023, kenaikan volume ekspor briket dan batubara juga didukung oleh permintaan Tiongkok yang berangsurangsur meningkat pasca reopening dengan didukung berlanjutnya implementasi kebijakan tarif nol untuk impor batu bara dari Pemerintah Tiongkok. Selain itu, peningkatan kebutuhan listrik yang diikuti upaya pencegahan krisis energi di India, turut mendorong permintaan batu bara kedua wilayah. Di sisi lain, kinerja ekspor wilayah lainnya melambat. Di Balinusra dan Sulampua, ekspor konsentrat tembaga melambat pada triwulan I 2023 sejalan dengan penambahan kapasitas produksi yang lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Lebih lanjut, kinerja berbagai produk manufaktur di Jawa, terutama alas kaki dan TPT, tertahan sejalan dengan perlambatan permintaan Amerika Serikat yang merupakan negara mitra dagang utama Jawa.

Pada keseluruhan 2023, kinerja ekspor nonmigas di sebagian besar wilayah diprakirakan tetap kuat, meski secara agregat tetap melambat sejalan dengan prospek ekonomi global. Proyeksi PDB dan permintaan dunia sepanjang 2023 masih tumbuh positif meski melambat. Reopening perekonomian Tiongkok juga akan berdampak positif terhadap permintaan beberapa komoditas SDA nasional. Di Kalimantan dan Sumatera, ekspor batu bara diprakirakan meningkat lebih tinggi dari prakiraan sejalan dengan peningkatan kebutuhan listrik di Tiongkok pasca reopening. Di Sulampua dan Balinusra, kinerja ekspor diprakirakan melambat sejalan dengan penambahan kapasitas produksi yang lebih terbatas. Lebih lanjut, ekspor besi baja dari Sulampua diprakirakan turut terdampak positif peningkatan permintaan Tiongkok, meski lebih terbatas karena peningkatan kapasitas produksi smelter yang lebih rendah dari prakiraan. Sementara itu di Jawa, kinerja ekspor manufaktur diprakirakan melanjutkan perlambatan sejalan dengan melambatnya permintaan global. Meskipun demikian, prospek perekonomian AS dan ASEAN yang lebih baik dari prakiraan sebelumnya berpotensi mendorong permintaan ekspor berbagai komoditas manufaktur Jawa lebih lanjut.

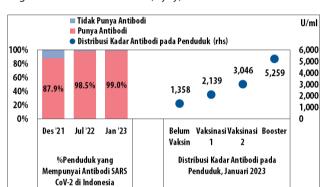


Sumber: Bea Cukai, diolah (data triwulan I 2023 s.d. Februari 2023)

Gambar II.1. Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan I 2023 (%yoy)

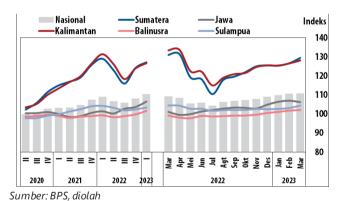
#### Konsumsi Swasta

Pertumbuhan konsumsi swasta pada triwulan I 2023 diprakirakan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung kasus COVID-19 tetap terkendali, meskipun sedikit meningkat pada akhir triwulan I 2023. Penanganan dan pencegahan yang lebih baik, didukung ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai dan berlanjutnya vaksinasi di berbagai daerah turut mendukung terjaganya situasi pandemi pada awal 2023<sup>1</sup>. Pada Januari 2023, telah dilaksanakan pula Sero Survei sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19 ke depan (Grafik II.1). Hasilnya, sekitar 99% masyarakat Indonesia telah memiliki antibodi COVID-19. Selain itu, masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi booster juga memiliki kadar antibodi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok masayarakat lainnya. Perkembangan positif tersebut terindikasi turut mendukung peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat, tercermin dari optimisme konsumen serta penjualan ritel yang tetap kuat pada triwulan I 2023. Dari sisi pendapatan masyarakat, khususnya kelas menengah bawah, Nilai Tukar Petani (NTP) juga melanjutkan perbaikan pada triwulan 1 2023 baik di sentra produksi tanaman bahan makanan maupun perkebunan (Grafik II.2).



Sumber: Survei Serologi SARS CoV-2 Januari 2023, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Grafik II.1. Hasil Sero Survei Januari 2023



Grafik II.2. Nilai Tukar Petani

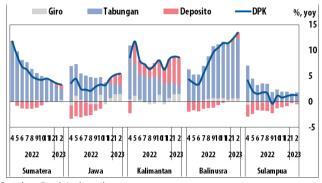
# Perkembangan positif pada triwulan I 2023 turut mendukung prospek konsumsi tetap kuat sepanjang

**2023.** Di tengah prospek perbaikan konsumsi pada triwulan I 2023, dana pihak ketiga (DPK) perseorangan di masyarakat melanjutkan perbaikan (Grafik II.3), terutama ditopang deposito untuk mendukung konsumsi di masa depan. Dalam jangka pendek, perayaan HBKN Ramadan dan Idulfitri pertama setelah pencabutan PPKM diprakirakan

4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pemerintah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh daerah melalui Inmendagri Nomor 53 tahun 2022 pada 30 Desember 2022

menopang konsumsi pada triwulan II 2023. Tekanan inflasi yang sempat meningkat pada akhir 2022 hingga saat ini terus melandai, dan diprakirakan kembali pada kisaran sasaran 3±1% pada semester II 2023. Lebih lanjut, meski saat ini status pandemi COVID-19 tetap berlaku, proses transisi menuju endemi tengah dikaji oleh Pemerintah dan berpotensi mendorong aktivitas konsumsi lebih tinggi ke depan. Untuk menjaga situasi pandemi COVID-19 tetap terkendali selama proses transisi, vaksinasi dan *booster* di berbagai daerah perlu terus dilanjutkan.

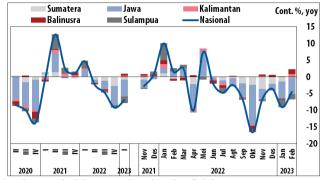


Sumber: Bank Indonesia

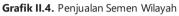
Grafik II.3. DPK Perseorangan Wilayah

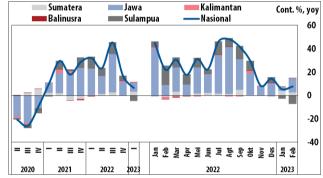
#### Investasi

Kinerja investasi daerah diprakirakan meningkat pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan IV 2022, terutama dari sisi investasi bangunan. Di sisi investasi bangunan, indikator penjualan semen (Grafik II.4) mengindikasikan perbaikan pada triwulan I 2023 kendati masih terkontraksi. Peningkatan terutama ditopang oleh kinerja wilayah Jawa dan Balinusra. Percepatan penyelesaian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) konektivitas, di samping penambahan beberapa PSN baru terkaitirigasi dan sektor industri mendorong kinerja investasi bangunan di Jawa pada triwulan I 2023. Selain itu, percepatan pembangunan sejumlah PSN irigasi, proyek pendukung ASEAN Summit, serta kawasan wisata menopang investasi bangunan di wilayah Balinusra. Sementara, curah hujan yang tinggi selama triwulan I 2023 serta sejumlah kendala teknis seperti pengadaan lahan, perizinan, dan ketersediaan infrastruktur pendukung menghambat penyelesaian proyek investasi bangunan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulampua. Dari sisi investasi nonbangunan, indikator impor barang modal (Grafik II.5) tetap tumbuh positif pada triwulan I 2023, kendati menurun dari triwulan sebelumnya. Investasi nonbangunan di berbagai wilayah didorong investasi terkait LU industri pengolahan. Di Jawa, investasi swasta menopang kinerja investasi nonbangunan meliputi industri petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Sementara, di Sumatera pertumbuhan investasi nonbangunan didorong upaya peningkatan kapasitas produksi sejumlah industri, antara lain pulp & paper dan timah. Selain itu, peningkatan kapasitas industri hilirisasi nikel di Sulampua juga turut mendorong kinerja investasi bangunan pada triwulan I 2023.



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah





Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.5. Nilai Impor Barang Modal Wilayah

# Prospek investasi daerah pada 2023 diprakirakan lebih baik dari 2022 meski di bawah prakiraan sebelumnya.

Peningkatan kinerja investasi terjadi di hampir seluruh wilayah, didorong percepatan penyelesaian PSN di berbagai daerah di tengah investasi swasta yang terus berlanjut. Investasi di <u>Balinusra</u> diprakirakan meningkat sejalan dengan percepatan pembangunan PSN infrastruktur irigasi, di samping proyek strategis lainnya khususnya di sektor pariwisata dan industri logam. Kendati demikian, perbaikan investasi Balinusra diprakirakan tidak setinggi prakiraan dipengaruhi oleh pembangunan sejumlah proyek strategis yang belum memenuhi target di tengah risiko faktor cuaca. Investasi di Jawa diprakirakan meningkat sejalan prakiraan ditopang percepatan sejumlah PSN jalan tol serta berlanjutnya pengembangan kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di beberapa daerah. Sejumlah kendala, antara lain perizinan lahan, kenaikan harga bahan baku, serta pelemahan industri orientasi ekspor diprakirkan menahan perbaikan investasi Jawa lebih lanjut. Sementara itu, investasi di wilayah <u>Sumatera</u> diprakirakan meningkat lebih tinggi dari prakiraan sejalan dengan percepatan penyelesaian PSN konektivitas yang sempat tertunda pada triwulan IV 2022, di tengah perbaikan prospek permintaan domestik terutama di LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Selain itu, kinerja investasi di

Kalimantan juga diprakirakan meningkat di atas prakiraan didorong realisasi anggaran untuk proyek baru pada Ibu Kota Negara (IKN), di tengah keberlanjutan penyelesaian sejumlah infrastruktur irigasi dan fasilitas pengolahan migas. Di sisi lain, kinerja investasi Sulampua diprakirakan melambat pada tahun 2023 seiring normalisasi investasi tambang bawah tanah di Papua, serta penyelesaian proyek fasilitas LNG train di Papua Barat. Kendati demikian, kondisi tersebut masih lebih tinggi dari prakiraan ditopang penambahan sejumlah PSN baru di tahun 2023 serta peningkatan konstruksi swasta residensial.

#### Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah

Stimulus fiskal di daerah pada triwulan I 2023 diprakirakan tumbuh lebih lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Prospek positif belanja APBD pada triwulan berjalan tercermin dari relatif terjaganya waktu penetapan Perda tentang APBD 2023 oleh Pemda, serta membaiknya realisasi belanja Pemda di awal tahun, khususnya pada jenis belanja pegawai dan belanja lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi belanja barang dan jasa yang terkait dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) juga terpantau cukup baik, terutama di wilayah Sumatera dan Jawa. Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) secara agregat sedikit terkontraksi terutama akibat tertahannya Dana Alokasi Umum (DAU), ditengah proses yang dilakukan Pemda untuk melengkapi pemenuhan persyaratan administratif untuk penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked). Kontraksi TKD lebih lanjut tertahan oleh membaiknya penyaluran DBH, khususnya DBH SDA Minerba, Dana Desa, dan DAK Non Fisik (Tabel II.1). Secara spasial, daerah dengan realisasi TKD yang baik didominasi oleh daerah di wilayah Kalimantan, sejalan dengan penyaluran DBH yang relatif baik di wilayah tersebut. Lebih lanjut, TKD masih mendominasi pendapatan daerah. Sementara itu, Jawa dan Balinusra merupakan merupakan wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat relatif tinggi. Selanjutnya, dalam rangka mendukung kegiatan pengendalian inflasi di daerah, optimalisasi dana dari APBD, termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan belanja subsidi, dapat terus dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh Pemda melalui sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, optimalisasi penyerapan dana transfer perlu ditingkatkan oleh Pemda, terutama untuk mendukung perbaikan perekonomian di daerah.

Kinerja belanja Pemda 2023 diprakirakan meningkat dan lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan pagu belanja APBD dan TKD secara agregat pada 2023. Peningkatan pada APBD terjadi pada seluruh komponen belanja, yakni belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Sementara itu, peningkatan pada TKD terjadi antara lain pada komponen DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian serta DBH SDA Minerba, Khusus pada DAK Non Fisk Ketahanan dan Pertanian, terjadi peningkatan alokasi sebesar 50% (yoy) yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan fasilitasi layanan publik, yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengendalian inflasi daerah. Sementara itu, sejalan dengan kebijakan penyaluran DBH untuk daerah pengolah yang berlaku pada 2023, maka daerah yang telah melakukan hilirisasi akan mendapatkan alokasi DBH dari PNBP SDA yang diterima daerah tersebut, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan ketahanan ekonomi daerah. Selanjutnya, dukungan inovasi, khususnya melalui digitalisasi Sistem Pembayaran dapat mendorong optimalisasi potensi PAD Pemda di tengah aktivitas perekonomian yang berangsur meningkat. Di sisi lain, perlu terus dimitigasi potensi risiko ke depan yang dapat menahan perbaikan stimulus belanja APBD yakni tertahannya proyek pemerintah, khususnya yang menggunakan anggaran belanja modal. Oleh karenanya, persiapan kelengkapan dokumen administratif yang dilakukan dengan tata kelola dan koordinasi yang baik antar OPD perlu ditingkatkan.

Tabel II.1. Transfer ke Daerah (TKD)

rabel iii. Hansiel ke baelan (IKb)								
	Pagu _		Realisasi					
TKOD(TriliunRp)	Perpres	Perpres Pagu 2023	sd Feb 2022 sd Feb 2023	%thdpagu	%thdpagu	Feb2023		
	98/2022		S0. Pe02022	S0. PED 2023	sd. Feb 2022	sd. Feb 2023	(yoy)	
I. Dana Perimbangan	708.0	718.1	107.1	99.0	15.1%	13.8%	-7.6%	
A Dana Transfer Umum	518.4	5323	95.2	86.5	18.4%	16.2%	-9.2%	
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	140.4	136.3	7.1	14.8	5.1%	10.9%	107.7%	
2 Dana Aldkasi Umum (DAU)	378.0	396.0	88.1	71.7	23.3%	18.1%	-186%	
B DanaTransfer Khusus	189.6	185.8	11.9	125	6.3%	6.7%	-	
1. Dana Aldkasi Khusus (DAK) Fisik	60.9	53.4	-	-	0.0%	0.0%	-	
2 Dana Aldkasi Khusus (DAK) Nonfisik	128.7	130.3	11.9	125	9.3%	9.6%	4.99	
3. Hbahke Dærah	-	21		-	0.0%	0.0%	-	
II. Insentif Fiskal (d.h. DID)	7.0	80	-	-	0.0%	0.0%	-	
III. Dana Cisusdan Keistimewaan	21.8	187	-	-	0.0%	0.0%	-	
DanaDesa	68.0	70.0	3.4	6.2	5.0%	8.9%	84.9%	
TKD	804.8	814.7	110.5	105.2	13.7%	129%	-48%	

Sumber: Kemenkeu, diolah

# Kinerja Lapangan Usaha

#### LU Pertanian

Kinerja LU Pertanian pada triwulan I 2023 diprakirakan melambat di hampir seluruh wilayah, kecuali Balinusra dan Sulampua. Kinerja subLU tabama dan perikanan diprakirakan menopang capaian LU Pertanian pada triwulan I 2023. Produksi padi meningkat seiring memasuki puncak panen tahunan di berbagai daerah sentra pada Maret 2023, kendati capaian panen di beberapa daerah tertahan puso akibat tingginya curah hujan pada awal tahun (Sumatera & Jawa) dan adanya pergeseran periode puncak panen (Jawa). Selain itu, wabah hama dan penyakit tungro yang menghambat produktivitas padi pada triwulan IV 2022 (Kalimantan) juga berhasil teratasi sehingga turut

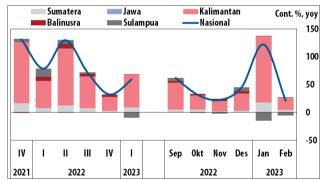
mendorong produksi pada triwulan I 2023. Sementara itu, produksi perikanan juga meningkat sejalan dengan kondisi gelombang laut yang relatif lebih kondusif dari triwulan sebelumnya untuk penangkapan ikan laut, terutama di wilayah Sulampua. Lebih lanjut, peningkatan permintaan, baik di domestik maupun global, serta kenaikan harga jual komoditas perikanan global mendorong produksi perikanan tangkap. Di sisi lain, kinerja LU Pertanian pada triwulan I 2023 tertahan kinerja subLU perkebunan dan hortikultura. Produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melambat sesuai pola tahunannya pascapuncak panen pada triwulan sebelumnya, terutama di wilayah Kalimantan. Selain itu, perkebunan sawit di berbagai daerah sentra tengah mengalami low production season seiring memasuki musim trek. Kinerja subLU perkebunan juga tertahan perlambatan produksi komoditas karet akibat penyakit gugur daun (Kalimantan) dan tingginya curah hujan yang mengganggu proses penyadapan (Sumatera). Kinerja subLU hortikultura melambat pada triwulan I 2023 seiring memasuki masa tanam di berbagai daerah sentra, terutama untuk komoditas aneka cabai dan bawang merah. Capaian panen hortikultura di beberapa daerah juga kurang optimal akibat gagal panen karena banjir dan serangan hama (Jawa), khususnya pada komoditas cabai merah.

Secara keseluruhan 2023, LU Pertanian diprakirakan sesuai prakiraan sebelumnya. Produktivitas subLU perkebunan yang tetap terjaga diprakirakan menopang pertumbuhan LU Pertanian pada tahun 2023. Di Sumatera, produksi TBS kelapa sawit pada tahun 2023 diprakirakan meningkat di atas prakiraan disebabkan dampak kendala pemupukan tahun 2022 pada penurunan produktivitas tahun 2023 yang tidak sedalam prakiraan. Selain itu, peningkatan luas lahan replanting sawit yang memasuki usia produktif, serta penguatan permintaan domestik komoditas CPO, khususnya dari industri makanan dan minuman seiring perbaikan mobilitas masyarakat, berpotensi mengakselerasi peningkatan produksi TBS kelapa sawit lebih lanjut. Kinerja perkebunan juga diprakirakan menopang peningkatan LU Pertanian di Kalimantan lebih tinggi dari prakiraan. Sejalan dengan wilayah Sumatera, produksi TBS kelapa sawit di Kalimantan diprakirakan meningkat lebih tinggi dari prakiraan disebabkan dampak kendala pemupukan tahun 2022 yang lebih minim, serta didukung ketersediaan tenaga pemanen yang tetap terjaga selama periode HBKN dan cuaca yang lebih kondusif. Kinerja LU Pertanian di Balinusra berpotensi meningkat di atas prakiraan didukung oleh kinerja subLU tabama seiring peningkatan produktivitas padi yang didorong program intensifikasi pemerintah dan kinerja subLU peternakan yang ditopang peningkatan realisasi vaksinasi penyakit mulut kuku (PMK), terutama pada komoditas sapi ternak. Sementara itu, peningkatan kinerja LU Pertanian di

<u>Sulampua</u> diprakirakan ditopang subLU tabama sejalan peningkatan produktivitas padi yang juga didukung oleh implementasi kredit usaha rakyat (KUR) pertanian dan kebijakan subsidi pupuk. Kendati demikian, kebijakan penangkapan ikan terukur berisiko memengaruhi kinerja subLU perikanan. Di sisi lain, kinerja LU Pertanian di <u>Jawa</u> diprakirakan melambat pada tahun 2023 di bawah prakiraan sebelumnya dipengaruhi capaian produksi subLU tabama dan hortikultura yang kurang optimal akibat gagal panen awal tahun disebabkan banjir (puso) dan gangguan hama. Dengan demikian, secara nasional kinerja LU Pertanian pada tahun 2023 masih sejalan prakiraan sebelumnya.

#### LU Pertambangan

Kinerja LU Pertambangan pada triwulan I 2023 masih kuat namun diprakirakan melambat. Hingga Februari 2023, kinerja ekspor komoditas pertambangan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, namun hal tersebut lebih diakibatkan dampak larangan ekspor batu bara awal 2022 terhadap pertumbuhan Januari 2023 (Grafik II.6). Dari sisi permintaan ekspor, dampak positif pembukaan kembali aktivitas ekonomi Tiongkok terindikasi belum mendorong ekspor komoditas pertambangan daerah tumbuh lebih tinggi hingga triwulan I 2023. Sementara itu, kinerja produksi terindikasi tertahan akibat peningkatan kapasitas yang lebih terbatas serta sejumlah kendala produksi yang turut berdampak pada melambatnya pertumbuhan LU Pertambangan.



Sumber: Bea Cukai, diolah

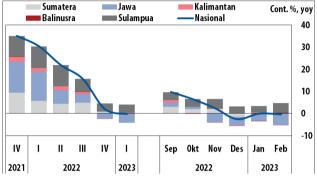
Grafik II.6. Nilai Ekspor LU Pertambangan Wilayah

Di <u>Sulampua</u>, kinerja LU Pertambangan pada triwulan I 2023 diprakirakan melambat. Perlambatan terutama dipengaruhi penambahan kapasitas produksi pertambangan tembaga yang semakin terbatas sejak naiktinggi pada 2021. Bencana banjir dan longsor juga menghambat kinerja produksi tembaga di Papua. Pertambangan nikel terindikasi juga tertahan akibat adanya *maintenance* pada beberapa *line smelter* sehingga serapan nikel lebih terbatas. Sejalan dengan Sulampua, LU Pertambangan <u>Balinusra</u> diprakirakan melambat pada triwulan I 2023. Kenaikan kapasitas produksi juga relatif terbatas pada periode laporan, setelah naik tinggi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, kualitas bijih yang lebih baik serta upaya untuk mendorong pemenuhan kuota ekspor hingga Maret 2023 diprakirakan mendukung LU Pertambangan Balinusra tetap tumbuh kuat. Di sisi lain, sejalan dengan kinerja ekspor batu bara, kinerja LU Pertambangan Sumatera dan Kalimantan pada triwulan I 2023 diprakirakan membaik. Pada periode yang sama tahun lalu, kebijakan larangan ekspor untuk prioritisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri turut berdampak pada penurunan aktivitas produksi korporasi, sehingga pertumbuhan tahunan produksi batu bara pada triwulan I 2023 cukup tinggi sejalan dengan kinerja ekspornya. Selain itu, kendala cuaca yang minim serta pasokan alat berat yang terjaga turut mendukung kinerja produksi batu bara. Namun, produksi bauksit Kalimantan terindikasi tertahan akibat kuota ekspor beberapa korporasi yang telah habis sebelum larangan berlaku pada Juni 2023.

Prospek permintaan global diprakirakan turu t mendorong kinerja LU Pertambangan 2023 tumbuh lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya meski teap melambat. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi Tiongkok diprakirakan mendorong pertumbuhan lebih tinggi pada 2023, terutama didorong konsumsi dan investasi. Meski masih berdampak terbatas pada triwulan I 2023, namun peningkatan kebutuhan pembangkit listrik Tiongkok sepanjang 2023<sup>2</sup> diprakirakan turut mendorong peningkatan ekspor batu bara dari Kalimantan dan Sumatera. Daya saing kedua wilayah juga cukup tinggi, mengingat jenis batu bara yang diimpor Tiongkok dari Indonesia cukup spesifik dan berbeda dari negara lainnya. Kebutuhan dalam negeri juga diprakirakan dapat terpenuhi, didukung berbagai kebijakan Pemerintah antara lain menjalin kontrak jangka panjang dengan korporasi untuk menjaga kontinuitas pasokan ke pembangkit listrik. Kinerja LU Pertambangan Sulampua juga diprakirakan terdampak pembukaan kembali ekonomi Tiongkok, terutama peningkatan produksi nikel untuk memasok kebutuhan besi baja. Meskipun demikian, penambahan kapasitas produksi smelter yang lebih terbatas terindikasi mengakibatkan peningkatan permintaan tersebut tidak dapat sepenuhnya dioptimalkan. Di sisi lain, kinerja LU Pertambangan Balinusra diprakirakan tidak sekuat proyeksi sebelumnya, sejalan dengan penambahan kapasitas penambangan yang relatif terbatas pada 2023 setelah naik tinggi pada tahun sebelumnya.

Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2023 tetap kuat didukung permintaan domestik, meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Permintaan domestik menopang kinerja industri sejalan dengan peningkatan mobilitas dan ekspektasi konsumen yang tetap optimis, sehingga mendorong kinerja berbagai industri berorientasi domestik pada triwulan I 2023. Namun, permintaan ekspor dari mitra dagang utama melambat sehingga menahan pertumbuhan ekspor di sejumlah wilayah sampai dengan Februari 2023 (Grafik II.7).



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik II.7. Volume Ekspor Komoditas Industri Pengolahan Daerah

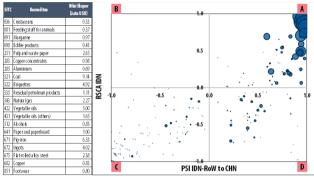
Industri makanan minuman (mamin) diprakirakan meningkat seiring peningkatan permintaan pada periode Ramadan dan HBKN. Di Sumatera dan Kalimantan, produksi CPO pada triwulan I 2023 diperkirakan tetap tumbuh ditopang permintaan domestik, meski melambat sejalan dengan pola musiman. Dari sisi domestik, kinerja produksi CPO diprakirakan tetap kuat seiring dengan dimulainya program B35 pada Februari 2023, serta kebijakan DMO 50% untuk memastikan ketersediaan pasokan menjelang HBKN. Namun, produksi CPO di Sumatera melambat karena mulai memasuki musim trek pascapanen raya, disertai dengan curah hujan yang tinggi. Dari sisi ekspor, volume ekspor CPO tetap kuat meski sedikit melambat seiring harga yang relatif tinggi di tengah pungutan ekspor dan bea keluar yang stabil. Sementara itu, ekspor industri logam dasar khususnya logam timah Sumatera dan logam alumina Kalimantan diprakirakan tetap naik. Kinerja LU Industri Pengolahan Sulampua pada triwulan I 2023 lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya meski tumbuh melambat. Hal ini dipicu oleh produksi NPI dan SS yang terbatas seiring melemahnya permintaan Tiongkok. Selain itu, produksi industri mamin terindikasi meningkat, terutama didorong oleh penjualan domestik yang tetap kuat. Sementara itu, LU Industri Pengolahan di <u>Jawa</u> terindikasi terdampak perlambatan permintaan global. Ekspor TPT dan alas kaki

8

LU Industri Pengolahan

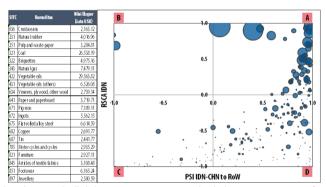
<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Konsumsi listrik Tiongkok diprakirakan tumbuh 6% (yoy) pada 2023, lebih tinggi dibandingkan 2022 yang tumbuh 3,6% (yoy). Sumber: *China Electricity Council*, Januari 2023.

masih tertahan sejalan dengan penurunan permintaan mitra dagang utama, terutama dari AS dan Eropa. Selain itu, kinerja industri otomotif juga diprakirakan tumbuh melambat seiring terhambatnya proses impor bahan baku produsen yang mayoritas menggunakan baja. Dengan perkembangan tersebut, proses produksi mengalami kendala dan berimbas pada produksi dan penjualan otomotif. Dengan perkembangan tersebut, kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2023 di sebagian besar wilayah diprakirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.



Sumber: WITS, diolah. Keterangan: \*) Nominal Ekspor IDN to CHN tahun 2021 (dalam miliar USD).

**Grafik II.8.** Similaritas Produk Ekspor Indonesia dengan Produk Ekspor *Rest of the World* ke Tiongkok



Sumber: WITS, diolah. Keterangan: \*) Nominal Ekspor IDN to Rest of World (RoW) tahun 2021 (dalam miliar USD).

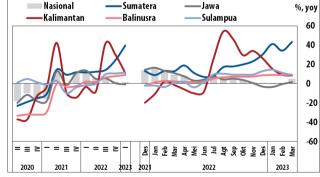
**Grafik II.9.** Similaritas Produk Ekspor Indonesia dengan Produk Ekspor Tiongkok ke *Rest of the World* 

**Pada** 2023, permintaan domestik diprakirakan mendorong kinerja LU Industri Pengolahan di tengah perlambatan ekonomi global. LU Industri Pengolahan di Jawa diprakirakan tetap tumbuh, terutama berbagai industri berorientasi domestik. Namun, pertumbuhan ini melambat sejalan dengan pelemahan permintaan mitra dagang utama yang menyebabkan kinerja ekspor tertahan. Di sisi lain, kinerja LU Industri Pengolahan Sumatera dan Kalimantan diprakirakan masih membaik, ditopang kinerja industri berbasis kelapa sawit, antara lain dari peningkatan permintaan domestik, termasuk program B35 dan peningkatan alokasi biodiesel. Selain itu, produksi diperkirakan lebih baik sejalan dengan lebih minimnya dampak kendala pemupukan dibanding perkiraan

sebelumnya, serta cuaca yang lebih kondusif. Di Sulampua, industri besi baja diprakirakan melambat, sejalan dengan adanya delay commissioning pada beberapa line di beberapa sentra hilirisasi, sehingga tambahan kapasitas produksi lebih rendah dari perkiraan semula. Sementara itu, di tengah perekonomian global yang masih tertahan, pembukaan kembali Tiongkok pascakebijakan zero covid policy memberikan sejumlah peluang dan risiko yang perlu diantisipasi. Pembukaan ekonomi Tiongkok berpeluang meningkatkan ekspor produk unggulan Indonesia dengan permintaan cukup besar di Tiongkok, khususnya produk batubara, besi baja, CPO, dan kertas yang secara global juga berdaya saing tinggi (Grafik II.8). Namun, dampak positifini juga diikuti dengan risiko tertahannya permintaan produk Indonesia mengingat sejumlah produk memiliki similaritas dengan produk ekspor Tiongkok, antara lain TPT, alas kaki, kendaraan bermotor, dan furnitur (Grafik II.9).

#### LU Perdagangan

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2023 diprakirakan membaik dari triwulan sebelumnya. Perkembangan ini sejalan dengan perbaikan pada mobilitas masyarakat pasca dicabutnya kebijakan PPKM sehingga turut meningkatkan permintaan domestik dan aktivitas masyarakat. Faktor lainnya yang turut menopang perbaikan penjualan ritel pada triwulan I 2023 yakni terjaganya daya beli masyarakat seiring naiknya UMP di tengah inflasi yang relatif terkendali. Kinerja LU Perdagangan juga tercermin dari kinerja penjualan eceran pada triwulan I 2023 yang tercatat tetap kuat di sebagian besar wilayah (Grafik. II. 10). Selain itu, penyaluran kredit kendaraan bermotor terpantau tetap tinggi, terutama ditopang kredit untuk jenis kendaraan mobil. Hal ini sejalan dengan penjualan mobil pada triwulan I 2023 yang masih berada di level yang tinggi meski sedikit melambat dari triwulan sebelumnya (Grafik. II.11). Lebih lanjut, kinerja LU Perdagangan diprakirakan tumbuh sejalan dengan meningkatnya keyakinan konsumen di sebagian besar wilayah.

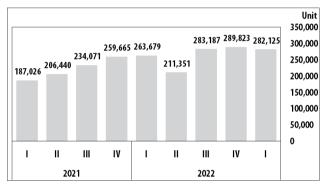


Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.10. Indeks Riil Penjualan Eceran

Secara keseluruhan 2023, kinerja LU Perdagangan diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan

proyeksi sebelumnya. Permintaan domestik yang tetap kuat menopang kinerja LU Perdagangan, terutama menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Di samping itu, perbaikan capaian inflasi pada keseluruhan tahun diprakirakan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan pengurangan jam kerja dan *layoff*. Optimisme perbaikan LU Perdagangan juga tercermin dari meningkatnya target penjualan motor domestik 2023 oleh AISI menjadi 5,8 juta unit dari target semula 5,4 juta hingga 5,6 juta unit (Grafik. II. 12). Bersamaan dengan itu, adanya insentif *Electric Vehicle* (EV) oleh pemerintah pada kendaraan roda empat dan roda dua, serta potensi kegiatan politik menjelang pemilu diprakirakan dapat mengakselerasi kinerja perdagangan lebih lanjut.



Sumber: Gaikindo

Grafik II.11. Penjualan Wholesales Mobil



Sumber: AISI, diolah

Grafik II.12. Target Penjualan Motor Domestik

#### LU Transportasi dan Pergudangan

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan I 2023 diprakirakan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Peningkatan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan didorong oleh pertumbuhan transportasi barang, khususnya transportasi melalui angkutan laut seiring dengan percepatan pengiriman logistik sebelum HBKN Idulfitri dan peningkatan mobilitas di tengah perbaikan kinerja pada lapangan usaha utama, terutama di Jawa dan Kalimantan. Di sisi lain, pertumbuhan lebih tinggi tertahan oleh penurunan jumlah penumpang yang cukup terutama pada angkutan darat seiring dengan efek musiman low season pada bulan Februari dan normalisasi

pergerakan wisatawan pasca Natal dan Tahun Baru serta pelaksanaan KTT G20, terutama di Sulampua dan Balinusra (Grafik II.13). Lebih lanjut, cuaca buruk juga menyebabkan terjadinya beberapa pembatalan penerbangan dan penghentian sementara aktivitas pelayaran. Namun, kinerja angkutan penumpang diprakirakan akan membaik seiring dengan persiapan menjelang mudik HBKN Idulfitri.



Sumber: BPS

**Grafik II.13.** Jumlah Penumpang berdasarkan Moda Transportasi s.d Februari 2023



Sumber: BPS

**Grafik II.14.** Pertumbuhan Transportasi Barang berdasarkan Moda Transportasi s.d Februari 2023

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan 2023 diprakirakan lebih baik dari prakiraan sebelumnya, meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat didorong pencabutan PPKM dan terkendalinya kasus COVID-19. Jumlah penerbangan di wilayah Jawa serta jumlah dan frekuensi penerbangan ke wilayah Balinusra meningkat merespons peningkatan aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, momen pembangunan IKN yang semakin masif di wilayah Kalimantan juga turut mendorong kinerja LU Transportasi dan Pergudangan yang diprakirakan lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Secara keseluruhan, prospek LU ini juga ditopang oleh aktivitas logistik domestik yang masih kuat, tercermin pada sejumlah pelabuhan utama. Di sisi lain, perlambatan sektor tradables di sejumlah wilayah dan tertahannya aktivitas bongkar muat pelayaran asing diperkirakan menahan pertumbuhan lebih lanjut. Ke depan, kinerja Transportasi dan Pergudangan dapat lebih dioptimalkan didukung pemerataan ekosistem digital di

seluruh wilayah untuk mendukung ekonomi nasional yang lebih efisien dan inklusif.

# LU Penyediaan Akomodasi & Makanan dan Minuman (Akmamin)

Kinerja LU Akmamin pada triwulan I 2023 diprakirakan tetap kuat kendati lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Prakiraan ini ditopang oleh mobilitas masyarakat yang terus meningkat, tingkat keyakinan konsumen yang tetap kuat, serta tingkat okupansi hotel di sejumlah destinasi utama pada triwulan I 2023 yang telah melampaui pre-pandemi. Adapun peningkatan permintaan akomodasi menjelang HBKN dan periode cuti bersama turut menopang kinerja Akmamin tersebut. Meskipun demikian, perbaikan lebih lanjut tertahan oleh rendahnya realisasi kredit pada sektor Akmamin sehubungan penilaian *risk appetite* perbankanyang relatif tinggi pada sektor tersebut Selain itu, harga energi yang masih relatif tinggi berpotensi menahan kunjungan dan mobilitas wisatawan.

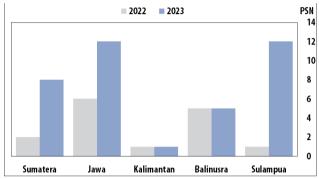
Kinerja LU Akmamin pada 2023 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya. Prospek ini sejalan dengan peningkatan aktivitas wisatawan nusantara (wisnus) serta penyelenggaraan berbagai event dan MICE yang terus bertambah, termasuk Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI). Di domestik, berbagai indikator turut mendukung prospek positif tersebut, antara lain mobilitas terkait pariwisata yang terjaga pada level yang tinggi, tingkat okupansi hotel yang terus meningkat, serta mobilitas yang diprakirakan meningkat signifikan pada periode HBKN, khususnya Idulfitri. Ke depan, peningkatan wisatawan mancanegara (wisman) akan turut mendukung kinerja LU Akmamin, antara lain melalui perhelatan sejumlah event bertaraf internasional yakni Indonesia Open di Jakarta, Sail Cendrawasih di Biak Numfor, dan rangkaian kegiatan Keketuaan ASEAN yang diselenggarakan di berbagai lokasi di Indonesia. Selain itu, perbaikan kunjungan wisman lebih lanjut didukung oleh penambahan rute direct flight dari sejumlah negara, reaktivasi rute penerbangan, perluasan rute baru, serta penambahan maskapai baru ke daerah wisata, khususnya Bali. Lebih lanjut, sehubungan dengan reopening Tiongkok, wisman asal Tiongkok diprakirakan mulai terakselerasi pada akhir triwulan II 2023 kendati jumlahnya masih di bawah pra-pandemi di tengah risiko pemulihan kapasitas penerbangan dari negara tersebut yang masih terbatas. Dengan perkembangan tersebut, kunjungan wisman pada 2023 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan prakiraan semula.

#### LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2023 diprakirakan meningkat didorong percepatan penyelesaian PSN di beberapa wilayah. Peningkatan terutama didorong oleh kinerja LU Konstruksi di wilayah Jawa dan Balinusra. Percepatan penyelesaian sejumlah PSN yang terhambat pada triwulan IV 2022 atau ditargetkan selesai pada tahun 2023 menopang pertumbuhan LU Konstruksi di wilayah pada triwulan I 2023, antara lain Jalan Tol Semarang - Demak (Jawa), Jalan Tol Trans Sumatera (Sumatera), Kawasan Industri Pomala Industry Park (Sulampua), serta Bendungan Sidan (Balinusra). Progress pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan juga terus berlanjut meliputi sejumlah infrastruktur dasar, yakni penvelesaian infrastruktur perkantoran dan jalan tol. Di samping itu, kinerja LU Konstruksi juga ditopang percepatan pengerjaan revitalisasi infrastruktur pendukung menjelang HBKN seperti jalan tol, rumah sakit, serta penginapan. Sementara itu, sejumlah proyek swasta bernilai besar turut mendorong kinerja LU Konstruksi di berbagai wilayah, khususnya terkait pembangunan fasilitas pengolahan sejumlah korporasi besar seperti storage tank, fuel pipelines Tanjung Batu-Samarinda, serta smelter nikel. Kendati demkian, kenaikan biaya input, seperti bahan baku dan upah tenaga kerja, masih menjadi salah satu kendala utama yang menahan kinerja LU Konstruksi di berbagai wilayah. Di samping itu, terdapat sejumlah kendala teknis yang meliputi pembebasan lahan, perizinan, dan proses konstruksi akibat tingginya curah hujan di awal tahun. Beberapa PSN dan proyek swasta juga terindikasi belum mencapai target pembangunan pada triwulan I 2023.

Prospek LU Konstruksi diprakirakan meningkat di seluruh wilayah pada tahun 2023, meski di bawah prakiraan sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh percepatan penyelesaian PSN di berbagai daerah (Grafik II.15) di tengah kinerja konstruksi swasta yang membaik. Namun, dampak kenaikan biaya input serta berbagai kendala teknis terindikasi menahan progress penyelesaian beberapa proyek strategis, sehingga kineria LU Konstruksi pada 2023 di bawah prakiraan sebelumnya. Di Sumatera, kinerja LU Konstruksi ditopang oleh berlanjutnya penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan sejumlah infrastruktur bendungan di berbagai provinsi. Namun, penyelesaian proyek-proyek tersebut diprakirakan mundur akibat isu pembebasan lahan yang dilalui ruas tol, serta tingginya curah hujan awal tahun yang menghambat proses pembangunan bendungan. Faktor cuaca juga menahan progress realisasi sejumlah PSN bendungan di wilayah Balinusra. Di samping itu, pembangunan smelter tembaga di NTB berjalan lambat sehingga turut menahan kinerja LU Konstruksi Balinusra pada tahun 2023. Di sisi lain, kinerja LU Konstruksi Kalimantan diprakirakan meningkat lebih tinggi dari prakiraan didorong percepatan realisasi PSN, yakni IKN dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Pembangunan Pelabuhan Kijing dan beberapa proyek swasta di bidang migas juga terus berlanjut, mendukung prospek LU

Konstruksi di wilayah Kalimantan. Di <u>Sulampua</u>, kinerja LU Konstruksi juga diprakirakan meningkat di atas prakiraan didorong oleh berlanjutnya kembali penyelesaian PSN yang sempat tertunda, di tengah menguatnya konstruksi swasta residensial sejalan peningkatan kuota bantuan subsidi perumahan dan program percepatan investasi. Sementara itu, kinerja LU Konstruksi di <u>Jawa</u> pada tahun 2023 diprakirakan meningkat sejalan prakiraan didorong realisasi pembangunan sejumlah PSN yang berlanjut dari 2022, di tengah peningkatan konstruksi residensial seiring selesainya pembangunan infrastruktur transportasi.

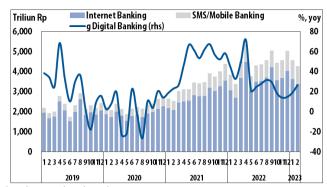


Sumber: KPPIP, diolah

**Grafik II.15.** Jumlah PSN yang Diprakirakan Selesai pada Tahun 2023

# Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Ekonomi dan keuangan digital tetap kuat pada triwulan I 2023, didorong oleh kemudahan sistem pembayaran digital di tengah momen HBKN Ramadan & Idulfitri. Hal ini tercermin dari transaksi digital banking yang tetap kuat dan tumbuh 22,3% (nom, yoy) pada triwulan I 2023<sup>3</sup> (Grafik II.16). Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, serta kemudahan dan akselerasi pada digital banking. Sejalan dengan kondisi tersebut, nilai transaksi melalui Uang Elektronik (UE) pada triwulan I 2023<sup>4</sup> meningkat sebesar 85,2 % (yoy). Sementara itu, nilai transaksi melalui Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu ATM/Debit, tumbuh 2,2% (yoy)<sup>5</sup> setelah pada periode sebelumnya terkontraksi. Adapun transaksi ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan I 2023 secara nominal mengalami kontraksi 1,1% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya. Sementara itu, transaksi nilai besar melalui Sistem BI Real Time Gross Settlement (RTGS) turut terkontraksi sebesar 29,4% (yoy).



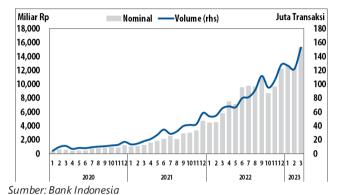
Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.16. Transaksi Digital Banking

Kolaborasi Bank Indonesia dengan bank sentral atau lembaga lainnya dalam mewujudkan dan mendukung pembayaran yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif terus diperkuat. Bank Indonesia bersama Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) telah menyepakati kerja sama dalam mendukung akselerasi sistem pembayaran. Implementasi QRIS antarnegara saat ini sudah bisa digunakan di Thailand. Sementara, QRIS Malaysia sedang tahap piloting, disusul QRIS Singapura dalam proses pengembangan/inisiasi. QRIS Jepang pun akan segera menyusul. Perluasan kerja sama ini dilakukan antara BI dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang melalui penandatanganan Nota Kerja Sama (NK) Pembayaran Berbasis QR code. Kerja sama pembayaran digital lintas negara ini menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan Japan Unified QR Code (JPQR). Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini merupakan wujud nyata implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments, serta menjadi terobosan dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan sejalan dengan Keketuaan Indonesia pada ASEAN and co-Chairmanship Jepang pada ASEAN+3 di tahun 2023. Di samping itu, di domestik Bank Indonesia akan terus mengakselerasi akseptasi QRIS yang masih terus tumbuh secara signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan transaksi QRIS secara nominal maupun volume sampai dengan triwulan I 2023 (Grafik II.17) dengan total volume sebesar 152,5 juta transaksi dan nominal sebesar Rp 15,3 T pada Maret 2023. Lebih lanjut, Bank Indonesia bersama dengan lembaga utama dalam ekosistem QRIS seperti Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) terus menelusuri potensi penyalahgunaan QRIS pedagang/merchant. Sehingga, dalam melakukan transaksi

<sup>3,4,5</sup> Periode data s.d. Februari

menggunakan QRIS, masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi dalam aplikasi pada saat memindai QRIS, antara lain memastikan nama pedagang/merchant yang tercantum di dalam aplikasi memang benar pedagang/merchant yang menerima pembayaran sesuai dengan tujuan transaksi yang dilakukan, serta mengikuti petunjuk pembayaran yang diinformasikan oleh pedagang/merchant.



Grafik II.17. Transaksi QRIS

Sementara itu, di sisi uang tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) hingga triwulan I 2023 tercatat tumbuh sebesar 4,8% (yoy). Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk memastikan kelancaran sistem pembayaran jelang HBKN Ramadan dan Idulfitri. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah menyiapkan uang kartal senilai Rp 195 triliun atau tumbuh sebesar 8,22% (yoy), meningkatkan dibandingkan realisasi tahun lalu dengan 5.066 titik layanan penukaran uang, bertambah 377 titik dari tahun sebelumnya. Antisipasi kenaikan ini mempertimbangkan pencabutan status Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik serta peningkatan mobilisasi masyarakat.

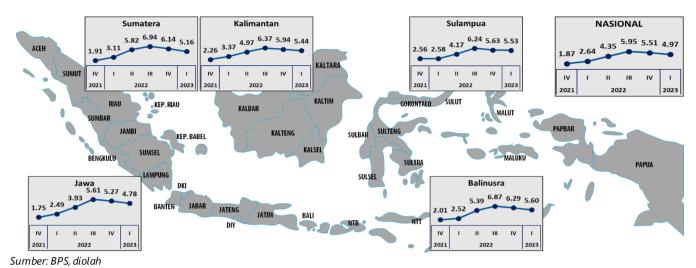
#### Inflasi Daerah

Inflasi gabungan kota IHK di seluruh wilayah Indonesia menurun sebagaimana nasional pada triwulan I 2023. Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan I 2023 sebesar 4,97% (yoy), lebih rendah dari capaian triwulan IV 2022 sebesar 5,51% (yoy). Penurunan tekanan inflasi gabungan kota IHK terjadi di semua wilayah, meski masih berada di atas rentang sasaran inflasi IHK nasional. Realisasi inflasi gabungan kota IHK tertinggi berada di wilayah Balinusra dan Sulampua masing-masing sebesar 5,60% (yoy) dan 5,53% (yoy). Sementara itu, disparitas inflasi secara spasial menyempit, dengan inflasi gabungan kota IHK tertinggi di Sulawesi Tenggara sebesar 6,61% (yoy) dan terendah di Sulawesi Barat sebesar 3,88% (yoy). Realisasi inflasi yang lebih rendah pada triwulan I 2023 disumbang oleh

kelompok inti dan *administered prices* (AP). Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* (VF) meningkat didorong oleh permintaan menjelang HBKN Idulfitri dan curah hujan tinggi yang masih berlangsung sehingga mengganggu ketersediaan pasokan pangan.

Inflasi kelompok inti terjaga rendah pada triwulan I 2023 atau menurun dari triwulan sebelumnya, seiring dengan kenaikan permintaan yang masih gradual dan transmisi harga komoditas global ke domestik yang masih terbatas. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, sementara transmisi harga komoditas global ke domestik terbatas seiring dengan penurunan harga global dan nilai tukar yang cenderung apresiatif. Lebih lanjut, inflasi inti yang lebih rendah juga didorong oleh ekspektasi inflasi yang secara umum terkendali akibat sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan komoditasnya, penurunan inflasi inti terutama disumbang oleh inflasikomoditas sabun detergen bubuk/cair dan mobil yang menurun dibandingkan dengan triwulan IV 2022 di semua wilayah. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga crude palm oil (CPO) yang menurun sebagai bahan baku aneka sabun dan normalisasi permintaan mobil setelah berakhirnya kebijakan insentif diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) pada tahun lalu. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih rendah tertahan oleh kenaikan andil inflasi upah asisten rumah tangga dan kontrak rumah yang terjadi di Sumatera dan Jawa.

Inflasi kelompok VF triwulan I 2023 secara nasional lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2022 didorong oleh meningkatnya permintaan menjelang periode HBKN dan kondisi cuaca yang kurang kondusif. Berdasarkan laporan BMKG, mayoritas daerah (77% wilayah nasional) masih mengalami musim hujan hingga Maret 2023 dengan curah hujan intensitas tinggi, sehingga mendisrupsi kesinambungan pasokan. Dari sisi komoditas, inflasi VF yang lebih tinggi terutama didorong oleh kenaikan andil inflasi beras dan cabai rawit di semua wilayah karena penurunan kualitas dan kerusakan tanaman produksi akibat curah hujan tinggi maupun banjir. Andil inflasi minyak goreng turut meningkat, terutama di gabungan kota IHK wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulampua, seiring dengan tingginya permintaan musiman menjelang periode HBKN Idulfitri. Selain itu, tekanan harga bawang putih meningkat akibat pasokan impor yang belum optimal. Secara nasional, peningkatan tekanan inflasi VF lebih lanjut tertahan didukung oleh sinergi kebijakan pengendalian harga pangan yang semakin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis lainnya melalui TPIP dan TPID serta pelaksan aan GNPIP.



Gambar II.2. Peta Inflasi Gabungan Kota dalam Provinsi dan Wilayah, Triwulan I 2023 (%yoy)

Inflasi kelompok AP menurun di semua wilayah didorong oleh penyesuaian harga energi nonsubsidi dan penurunan tarif angkutan udara (AU). Komoditas utama yang mengalami penurunan andil inflasi terbesar adalah Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT), tarif AU, dan bensin. Penurunan andil inflasi BBRT pada periode laporan disebabkan oleh base effect pascapenyesuaian harga Liquid Petroleum Gas (LPG) tahun lalu dan harga LPG di tingkat pengecer yang terjaga. Sementara itu, andil inflasi tarif AU menurun didukung oleh kebijakan penurunan tarif fuel surcharge sejak pertengahan Januari 2023 dan penurunan tarif tiket oleh maskapai low cost carrier (LCC) dibandingkan dengan tahun lalu untuk memenuhi keterisian kursi penumpang (seat load factor). Sementara itu, andil inflasi bensin juga menjadi lebih rendah akibat penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi pada Januari 2023. Khusus gabungan kota IHK di Jawa Barat, penurunan inflasi AP juga dipengaruhi oleh penyesuaian tarif Perusahaan Air Minum (PAM) per 1 Maret 2023 ke tarif awal atau kembali ke tarif per November 2022.

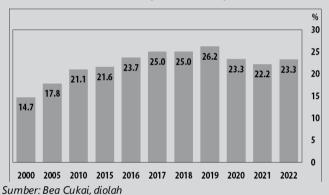
Prospek inflasi IHK 2023 diprakirakan kembali dalam rentang sasaran 3,0±1%. Tekanan inflasi diprakirakan menurun pada 2023 dan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, sejalan dengan terkendalinya ekspektasi inflasi, prospek penurunan harga komoditas global, serta nilai tukar

yang tetap terjaga dan cenderung lebih apresiatif. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran  $3.0\pm1\%$  pada semester I 2023 dan inflasi IHK mulai kembali ke dalam sasaran  $3.0\pm1\%$  di semester II 2023 seiring dengan berakhirnya base effect penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun lalu dan nilai tukar yang stabil.

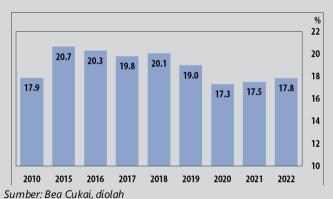
Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan mitra strategis lainnya dalam pengendalian inflasi, termasuk untuk menyambut periode HBKN. Sinergi TPIP-TPID dan GNPIP turut berkontribusi dalam menurunkan inflasi pangan pada 2022, dan pelaksanaannya akan terus diperluas di berbagai daerah pada 2023. Penguatan sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi akselerator dalam mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi dan mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus memastikan agar inflasi IHK kembali dalam sasaran yang telah ditetapkan. Dalam jangka pendek, guna memastikan terkendalinya inflasi menjelang periode HBKN, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi VF dan menjaga ekspektasi inflasi antara lain melalui dukungan kegiatan fasilitasi pasar murah, fasilitasi perluasan kerjasama antardaerah (KAD), serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi.

# Momentum Keketuaan ASEAN 2023 dalam Memperkuat Perekonomian dan Stabilisasi Inflasi Jawa

Indonesia kembali memegang Keketuaan ASEAN untuk kelima kalinya pada tahun 2023. Mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth", keketuaan ini diharapkan mampu menjaga peran sentral ASEAN bagi masyarakat ASEAN dan dunia, sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan. Selain itu, keketuaan Indonesia juga diharapkan mendorong ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia melalui perwujudan 3 (tiga) pilar, yaitu (i) Recover-Rebuilding dalam mengeksplorasi policy mix untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta mitigasi risiko inflasi, (ii) Digital Economy dalam memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, serta (iii) Sustainability dalam mempersiapkan dan mengarahkan ke tujuan yang sama dalam kaitan transisi menuju ekonomi hijau.



Grafik II.18. Pangsa Ekspor Non Migas Kawasan Jawa ke ASEAN



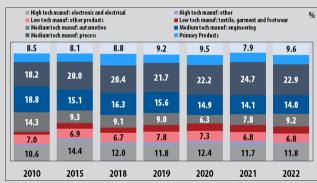
Grafik II.19. Pangsa Impor Non Migas Kawasan Jawa ke ASEAN

Peranan Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 menjadi momentum optimalisasi pemanfaatan dan perluasan kerjasama ekonomi dengan negara se-ASEAN. Sejak pertama kali terbentuk pada tahun 1967, ASEAN berperan penting dalam perdagangan luar negeri Indonesia dengan Jawa sebagai kontributor utamanya. Hal tersebut tercermin dari tren peningkatan pangsa ekspor Jawa ke ASEAN dari 14,72% pada tahun 2000 (peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Eropa) menjadi 23,28% pada tahun 2022 (peringkat pertama) khususnya ke Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Ekspor Jawa ke ASEAN juga memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi karena mayoritas merupakan *medium-technology product* yang didominasi oleh otomotif dan komponen pendukungnya. Di sisi lain, ASEAN terutama Singapura juga merupakan negara terbesar kedua setelah Tiongkok sebagai negara asal produk impor Jawa.



Sumber: Bea Cukai, diolah

**Grafik II.20.** Ekspor Non Migas ke ASEAN Berdasarkan Klasifikasi LALL

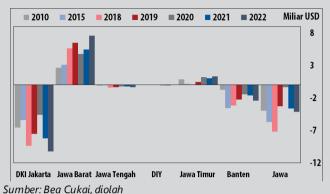


Sumber: Bea Cukai, diolah

**Grafik II.21.** Impor Non Migas ke ASEAN Berdasarkan Klasifikasi LALL

Namun demikian, neraca perdagangan Non Migas LN Jawa – ASEAN secara konsisten masih mengalami defisit dalam satu dasawarsa terakhir. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya nilai impor jenis *medium-high technology*, terutama bahan baku pendukung industri petrokimia. Lebih lanjut, penggunaan mata uang Dollar AS yang sangat mendominasi perdagangan LN Jawa – ASEAN hingga

mencapai 91% untuk ekspor dan 86% untuk impor, juga berpotensi meningkatkan kerentanan ekstemal di kawasan Jawa yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi.



Grafik II.22. Neraca Perdagangan Non Migas Jawa ASEAN

Mempertimbangkan potensi dan tantangan dalam perdagangan luar negeri tersebut, perluasan kebijakan Local Currency Settlement (LCS) di ASEAN menjadi solusi dalam mendorong efisiensi perdagangan untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Saat ini, Indonesia telah bekerjasama dengan dengan Thailand dan Malaysia dalam kerangka LCS. Namun, tren peningkatan perdagangan luar negeri antara Jawa dengan berbagai negara ASEAN lainnya selain Thailand dan Malaysia, seperti Vietnam, Filipina, dan Singapura juga menuntut optimalisasi LCS existing. Lebih lanjut, diversifikasi mata uang dalam penyelesaian transaksi perdagangan internasional dapat mengurangi risiko nilai tukar sehingga mendukung ketahanan eksternal wilayah Jawa dan negara ASEAN yang terlibat. Disamping itu, penguatan investasi di bidang petrokimia untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri utama serta penguatan investasi di bidang otomotif esensial untuk dilakukan.



**Grafik II.23.** Pangsa Penggunaan Mata Uang Dolar AS dalam Perdagangan LN Jawa-ASEAN



Sumber: BI, diolah

**Gambar II.3.** Negara Potensial Optimalisasi *Local Currency*Settlement

Event keketuaan ASEAN 2023 juga dapat menjadi momentum upaya stabilisasi inflasi bersama dengan negara anggota ASEAN melalui salah satu program ASEAN Leaders Statement on Strengthening Food Security. Keketuaan ini dapat didorong untuk memperluas sinergi kerjasama dengan Vietnam, Malaysia, dan Singapura sebagai negara dengan indikator Global Food Security Index (GFSI) diatas rata-rata global sebesar 62,2 (Indonesia sebesar 60,2) dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan stabilitas inflasi pangan. Berdasarkan data world bank, inflasi pangan Indonesia dan Gabungan Kota di Jawa sampai dengan Januari 2023 masing-masing mencapai 7,23% (yoy) dan 5,61% (yoy) atau tertinggi ke-3 setelah Laos dan Myanmar.

Quick wins strategy yang dapat dilakukan dalam momentum keketuaan ASEAN 2023 adalah dengan mendorong implementasi sejumlah program stabilisasi inflasi pangan, mulai dari penetapan ASEAN Harvest Calendar tiap tahunnya sebagai pedoman masa tanamdan produksi, yang kemudian dapat menjadi acuan dalam menginisiasi ASEAN Food Trade, semacam KAD pada level negara di ASEAN, untuk pemenuhan pasokan pangan negara anggota dengan tetap menjaga kebutuhan cadangan pasokan dalam negeri.



Sumber: World Bank, diolah

Grafik II.24. Perkembangan Inflasi Negara-Negara ASEAN



Sumber: World Bank, diolah

Grafik II.25. Perkembangan Inflasi Pangan Negara-Negara A

Secara jangka menengah panjang, reformulasi ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) terkait cadangan beras ASEAN-China-Japan-Korea perlu dilakukan, melalui perluasan klausul pemanfaatan cadangan beras ASEAN yang saat ini masih terbatas pada darurat bencana, dengan menambahkan juga darurat inflasi. Perluasan klausul tersebut juga perlu diperkuat melalui pengembangan sistem pangan ASEAN yang terintegrasi.



Sumber: Anekdotal, diolah

Grafik II.26. Root Cause Inflasi Tanaman Pangan

Lebih lanjut, penguatan *ASEAN digital farming* perlu untuk terus dikembangkan sebagai wujud penguatan kemandirian pertanian secara berkelanjutan. Upaya benchmarking kepada negara-negara anggota ASEAN yang telah memiliki kemandirian di bidang pertanian, seperti Vietnam dan Thailand, perlu ditingkatkan. Berdasarkan analisa ASEAN benchmark, terdapat 3 (tiga) pilar utama vang perlu diperkuat dalam mewujudkan kemandirian pertanian yang berkelanjutan yaitu (i) peningkatan produktivitas melalui dukungan penguatan infrastruktur irigasi dan rekayasa bibit termasuk penggunaan produkproduk organik sebagai wujud peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berkelanjutan, (ii) efisiensi biaya produksi melalui pemanfaatan teknologi & digitalisasi berupa penyediaan greenhouse serta dukungan insentif dalam rangka pengembangan sistem pertanian berbasis digital, serta (iii) optimalisasi dan efisiensi distribusi dengan mewujudkan ekosistem pasar yang efisien berupa optimalisasi skema kerjasama antarnegara, penguatan peran badan usaha pangan.

Tabel II.2. Prakiraan Pola Cuaca Di Wilayah Jawa

Komoditas					Heatmap Pasokan Komoditas Pangan 2023							
runuitas		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IndeksENSO	نا	a <b>Ni</b> naLen	neh		Netral	al Netral-B NinoLemah				El Nino Lemah		
Prakiraan MusimHujan		Musin	nHujan		Peralihan MusimKemarau Peralihan			Musin	usimHujan			
Prakiraan Qurah Hujan	Lebih	Tinggi	Lebih Rendah	Netral			Lebih Rendah				Netral	
Potensi Banjir	Rex	sikoMener	ngah	Resiko	ResikoRendah Amen							

Sumber: BMKG, diolah

**Tabel II.3.** Data Kebutuhan, Produksi dan Ekspor Beras Negara ASEAN (1.000 Ton)

Negara	Kebutuhan*	Produksi**	Ekspor*
Vietnam	21,500	26,770	6,800
Thailand	13,000	19,880	8,200
Filipina	15,750	12,540	-
Myanmar	10,300	12,350	2,400

Kat

\*Tahun 2022/2023

\*\*Tahun 2021/2022 Sumber: Statista, diolah "Halaman ini sengaja dikosongkan"

#### **BAGIAN 3**

# Isu Strategis: Penguatan Digitalisasi Pembayaran pada Program Pemerintah untuk Ketahanan dan Efisiensi Ekonomi Nasional

## Latar Belakang

Upaya Bank Indonesia dalam mendorong ekonomi dan keuangan digital (EKD) difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu digitalisasi Bansos (G2P 4.0), Transaksi Pemerintah Daerah (P2DD), dan Transportasi (Integrasi pembayaran, pemanfaatan Mobility as a Service/MaaS dan Account Based Ticketing/ABT). Sinergi dan percepatan implementasi digitalisasi pembayaran pada ketiga pilar utama diarahkan untuk memperkuat risiliensi dalam mendukung proses recovery, dan menciptakan efisiensi dalam perekonomian nasional. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengakselerasi proses digitalisasi agar berjalan sesuai target dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian.

Namun demikian, implementasi digitalisasi pembayaran pada 3 (tiga) area tersebut masih dihadapkan pada berbagai faktor risiko, diantaranya pandemi Covid-19 yang berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas ekonomi secara luas dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global maupun nasional. Di sisi lain, ketegangan geopolitik, tingginya inflasi di berbagai negara diikuti dengan global tightening, serta scarring effect yang menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan dan berpotensi berdampak simultan terhadap ekonomi domestik. Dalam halini, Bank Indonesia perlu melakukan upaya strategis dan antisipatif untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dan efisiensi dalam rangka mempertahankan momentum pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional, melalui 3 pilar digitalisasi.

Upaya Bank Indonesia dalam mendorong ekonomi dan keuangan digital telah tertuang secara forward looking sejak tahun 2019 melalui implementasi BSPI 2025. Hal ini sejalan dengan berbagai inisiatif quick wins yang direncanakan oleh Pemerintah dengan berkolaborasi bersama K/L dan industri SP untuk mengakselerasi digitalisasi di pilar elektronifikasi program pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam BSPI 2025, pengembangan digitalisasi SP, termasuk pada pilar digitalisasi program pemerintah, akan diarahkan pada Integrasi EKD untuk mendorong inklusi keuangan, Digitalisasi Perbankan (Transformasi BPD), interlink antara perbankan Bank dan Fintech melalui keseimbangan inovasi dan mitigasi risiko yang terukur dengan tetap mengedepankan kepentingan

nasional, serta mewujudkan efisiensi, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kualitas program pemerintah.

Berdasarkan hasil environmental scanning, masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan pengembangan digitalisasi program pemerintah. Sebagai contoh, meski telah tersedia, data digitalisasi pembayaran masih tersebar pada K/L ataupun PJP secara scattered. Selain itu, layanan perbankan, khususnya BPD, dinilai belum memadai. Di sisi lain, implementasi digitalisasi pembayaran pada ketiga area tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, yang secara umum berkaitan dengan kondisi infrastruktur, kesiapan Pemda, kondisi ekosistem digital, kompleksitas proses business to business (B2B), inefisiensi pasar serta keberlanjutan model bisnis digitalisasi transaksi dimaksud. Namun demikian, terdapat peluang untuk mengakselerasi implementasi digitalisasi pembayaran yang semakin terbuka, sejalan dengan penguatan kelembagaan, yang didukung berbagai inisiatif program digitalisasi K/L, serta komitmen Pemda dalam mendukung digitalisasi.

Untuk mengetahui kondisi perkembangan dan isu strategis dalam implementasi digitalisasi pembayaran di ketiga area, dilakukan asesmen menyeluruh dengan pendekatan 3I+2K, yang mencakup aspek Informasi dan Data, Infrastruktur, Implementasi, Koordinasi, serta Ketentuan. Hasil asemen 3I+2K tersebut menjadi referensi dalam penyusunan rekomendasi rencana aksi serta substansi koordinasi dalam jangka pendek – menengah pada ketiga area program, yang antara lain mencakup (1) Pembenahan data dan mekanisme bansos melalui konsep Pusat Pemeta Data Terintegrasi (PPDT); (2) Kenaikan pemda tahap digital sebesar 7% dan implementasi KKPD Domestik; (3) Perluasan *use case* elektronifikasi pembayaran transportasi dan penyiapan dukungan ekosistem SP.

# Perkembangan Program Digitalisasi

Pada fase awal, kebijakan digitalisasi pembayaran pada ketiga program Pemerintah tahun 2020 difokuskan untuk membangun awareness dan inovasi. Fokus kebijakan pada tahun 2021 kemudian ditingkatkan dengan penguatan kelembagaan dan regulasi serta standarisasi SP. Pada tahun 2022, percepatan digitalisasi ini dilakukan dengan fokus pada inklusivitas dan kompetisi yang akan diperkokoh dengan Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital. Hingga April 2023, berbagai upaya percepatan dan perluasan digitalisasi program pemerintah (bansos,

transaksi pemda, dan transportasi) terus berlanjut dan berjalan dengan baik

Mekanisme penyaluran bansos di Indonesia telah

# Digitalisasi Bantuan Sosial

melalui berbagai transformasi dengan tujuan untuk meningkatkan **kualitas** penyaluran bansos. Perkembangan teknologi memiliki peran penting dan menjadi kunci di setiap transformasi penyaluran bansos, yang pada awalnya dimulai secara tunai (G2P 1.0) dan kemudian bertransformasi menjadi penyaluran secara non tunai (G2P 2.0). Pada fase G2P 2.0, penyaluran bantuan dilakukan dengan menggunakan kartu dengan skema satu kartu untuk penyaluran satu jenis bantuan, yang selanjutnya berkembang menjadi satu kartu untuk berbagai jenis bantuan (G2P 3.0). Pada tahun 2022 bantuan PKH dan Program Sembako disalurkan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu secara tunai dan non tunai. Mekanisme non-tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan penyaluran secara tunai dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui 3 (tiga) mekanisme yaitu pengantaran langsung, komunitas, dan pengambilan di Kantor Pos. Pada tahun 2023, mekanisme penyaluran tunai dan non tunai PKH dan Sembako kembali berlanjut. Penyaluran secara hybrid tersebut dilakukan dalam rangka percepatan penyaluran untuk mengantisipasi dampak perkembangan kondisi global terhadap kemampuan dan daya beli masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial.

Secara umum penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai target setiap tahunnya. Hal ini tercermin dari tingkat persentase penyaluran terhadap target serta persentase pemanfaatan terhadap penyaluran bansos PKH dan Program Sembako yang telah berada di atas 90% sejak 2019. Pada triwulan I 2023, realisasi penyaluran bantuan PKH tercatat sebesar 14,80% dari target Rp28,7 triliun, sementara penyaluran Sembako telah direalisasikan sebesar 13,1% dari target sebesar Rp45,12 triliun.



**Grafik III.1.** Perkembangan penyaluran bansos PKH tahun 2017-2022



**Grafik III.2.** Perkembangan penyaluran bansos sembako tahun 2017-2022

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran bansos tersebut, upaya mendorong digitalisasi bansos terus dilakukan. Namun demikian, hal ini bergantung pada komitmen para pihak yang didukung dengan adanya arah kebijakan pengembangan uji coba dan implementasi G2P 4.0. Inisiatif digitalisasi bansos sejatinya telah dilaksanakan sejak 2021 ditandai dengan pengembangan konsep digitalisasi G2P 4.0 dan uji coba di 7 wilayah, serta penyusunan draft amandemen Perpres BSNT. Upaya mendorong digitalisasi bansos terus dilakukan pada 2022 dengan penyempurnaan konsep G2P 4.0 pasca uji coba. Selanjutnya untuk mendukung kelancaran digitalisasi bansos, pada 2023 dirumuskan konsep PPDT. Setelah ekosistem dan piloting teruji, pada 2024 – 2025, digitalisasi bansos diharapkan dapat diterapkan secara bertahap.

Dalam setiap tahapannya, Bank Indonesia senantiasa berperan aktif dalam mendukung digitalisasi bansos. Selama tahun 2021-2022, kontribusi BI telah banyak dilakukan dalam mendukung akselerasi digitalisasi bansos melalui penyusunan model bisnis, inisiasi harmonisasi Tim Pengendali BSNT, pemberian masukan substansi dalam pembahasan Perpres BSNT dan Reformasi Perlinsos, serta penerbitan pengaturan agen LKD melalui PADG PJP. Pada awal tahun 2023, BI juga terus melakukan monitoring dan masukan terhadap finalisasi amandemen Perpres BSNT dan Reformasi Perlinsos. Di samping itu, BI juga melakukan inisiasi penyusunan konsep PPDT sebagai salah satu upaya mendukung digitalisasi bansos, dari sisi perbaikan dan penyempurnaan data.

Ke depan, BI berkomitmen untuk terus berkontribusi secara optimal dalam mendorong pengembangan dan implementasi digitalisasi bansos, diantaranya memastikan kelancaran digitalisasi bansos, baik bansos regular maupun khusus terutama terkait aspek SP, monitoring komitmen dan implementasi PPDT, mendorong inisiasi implementasi digitalisasi bansos khususnya di daerah perkotaan, serta perluasan PJP sebagai Lembaga Penyalur.

## Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sejak pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh daerah di Indonesia pada 2021 lalu, implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) terus terakselerasi.

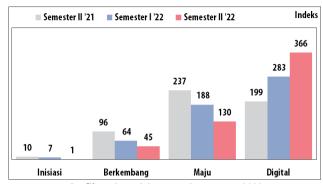
Hal ini tergambar dari peningkatan elektronifikasi di berbagai jenis transaksi pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan hasil survei Indeks ETPD semester II 2022, 96,5% dari total jenis pajak yang dipungut di daerah telah dapat dibayarkan secara nontunai, meningkat dibanding tahun 2021 yang sebesar 87,5%. Tingkat elektronifikasi pada pembayaran retribusi daerah juga meningkat, dari 60,7% pada tahun 2021 menjadi 85,4%. Sementara pada komponen belanja daerah, 96,3% jenis belanja daerah telah dielektronifikasi, meningkat dibanding capaian tahun 2021 sebesar 92,5%.

Secara spasial, capaian elektronfikasi transaksi belanja tertinggi terdapat di wilayah Jawa, dimana hampir seluruh jenis belanja daerah sudah menerapkan non tunai (99,9%). Akselerasi implementasi ETPD di wilayah Jawa juga terlihat dari tingginya capaian tingkat elektronifikasi transaksi pendapatan pajak dan retribusi non tunai, yang masingmasing sebesar 99,4% dan 95,5%. Capaian elektronifikasi tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat elektronifikasi transaksi pajak dan retribusi secara nasional. Di sisi lain, wilayah Balinusra dan Sulampua tengah berupaya untuk meningkatkan jenis transaksi retribusi daerah nontunai yang saat ini masing-masing baru mencapai 66% dan 76,3%. Sebagai contoh, wilayah Balinusra saat ini fokus untuk meningkatkan aspek ketersediaan infrastruktur kanal pembayaran, yaitu kanal reader uang elektronik, e-commerce, dan QRIS, yang memiliki peluang besar untuk di optimalkan khususnya pada daerah NTB dan NTT.

Peningkatan implementasi ETPD di berbagai wilayah telah mendorong 67,5% Pemda berada di tahap Digital.

Hasil pemetaan Indeks ETPD pada semester II 2022 mencatat sebanyak 366 Pemda telah berada di tahap Digital, meningkat 83,9% dibanding capaian pemda Digital di tahun 2021 sebanyak 199 Pemda. Sementara itu, jumlah pemda di tahap Maju mencapai 130 pemda (24%), tahap Berkembang sebanyak 45 pemda (8,3%), dan Tahap Inisiasi sebanyak 1 pemda (0,2%). Secara spasial, sebaran terbesar pemda tahap Digital berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Jumlah pemda Digital di wilayah Jawa tercatat sebanyak 114 pemda atau mencapai 95,8% dari jumlah pemda di Jawa, Untuk wilayah Sumatera, sebanyak 123 pemda (75%) telah berada di tahap digital. Sementara itu, pemda pada tahap digital di wilayah lainnya masih berada di tahap inisiasi adalah

Pemkab Kepulauan Yapen di Papua yang disebabkan masih terbatasnya penggunaan kanal digital dan perlu mendapat perhatian.



Grafik III.3. Indeks ETPD Semester II 2022

Percepatan dan perluasan digitalisasi pada program
Pemerintah telah berkontribusi terhadap peningkatan
penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.
Berdasarkan hasil pemetaan tahapan digitalisasi pemda.

Berdasarkan hasil pemetaan tahapan digitalisasi pemda, daerah dengan tahap Indeks ETPD yang lebih tinggi cenderung mengalami kontraksi PAD yang lebih rendah selama masa pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, daerah dengan capaian Indeks ETPD yang lebih tinggi cenderung memiliki realisasi belanjayang lebih tinggi. Kondisi tersebut turut didorong kemudahan dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran, pajak dan retribusi daerah.

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja P2DD, penyelenggaraan *Championship* TP2DD akan tetap *menjadi* flagship program Satgas P2DD di tahun 2023.

Pelaksanaan Championship untuk pertama dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai salah satu flagship program P2DD dan telah memberikan antusiasme yang tinggi bagi pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi Pemda yang mencapai 87,7% (dari total 542 Pemda), lebih tinggi dari target awal sebesar 70%. Penyampaian seluruh laporan juga telah dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi P2DD (SIP2D), yang telah diluncurkan Desember 2021 lalu sebagai salah satu kesinambungan program Satgas P2DD. Adapun pada tahun 2022, dilakukan penguatan pada aspek penilaian Championship antara lain penguatan pada variabel penilaian, reklasifikasi wilayah, dan tambahan penghargaan untuk program unggulan TP2DD terbaik. Perluasan kategori penghargaan dan wilayah tersebut diharapkan menambah motivasi Pemda dan mendorong partisipasi 100% Pemda dalam Championship TP2DD 2023. Sementara penyesuaian aspek penilaian dimaksudkan untuk melihat kesesuaian program dengan roadmap P2DD dan penyelarasan implementasi fokus program nasional di daerah, termasuk implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Domestik.

Bank Indonesia bersama anggota Satgas P2DD terus berkomitmen untuk mendorong implementasi P2DD. Sebagaimana arahan Satgas P2DD dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD Tahun 2022, terdapat lima area fokus penguatan implementasi ETPD, yaitu (i) penguatan regulasi di pusat dan daerah, (ii) ekosistem digital yang lebih luas melalui penyediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, (iii) integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara nasional, (iv) peningkatan sinergi pemerintah, BI, dan OJK untuk penguatan ekosistem yang mendorong peningkatan layanan digital BPD selaku bank RKUD, serta (v) penyusunan kerangka kebijakan implementasi elektronifikasi pajak kendaraan bermotor secara nasional dan perluasan kerjasama dengan market place untuk pembayaran transaksi pajak dan retribusi daerah. Berbagai fokus program tersebut dan penguatan koordinasi pusat – daerah harapannya dapat mendorong peningkatan digitalisasi transaksi pembayaran di daerah, dengan target sebanyak 75% Pemda di tahap digital pada tahun 2023.

## Digitalisasi Transportasi

Proses digitalisasi transportasi terus mengalami perkembangan yang eksponensial khususnya pada penggunaan berbagai kanal digital. Bank Indonesia sebagai otoritas SP terus mengawal pengembangan digitalisasi transportasi dan mendukung tren pembayaran moda transportasi pada berbagai kanal yang mengedepankan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal.

Milestone digitalisasi transportasi diawali pada tahun 2017 dengan elektronifikasi transportasi berbasis kartu dan terus diperluas pada tahun 2018 yang ditandai dengan kesuksesan 100% transaksi secara non tunai di jalan tol Jakarta. Pengembangan digitalisasi juga diperkuat oleh breakthrough QRIS di tahun 2019 dengan adanya launching QRIS dan showcase QRIS pada sektor transportasi. Selain itu, pada tahun 2020 juga diluncurkan rencana Multi Lane Free Flow (MLFF) dalam Permen PUPR No. 18 Tahun 2020 serta rencana integrasi antar moda dengan berdirinya PT Jaklingko Indonesia. Game changer digitalisasi transportasi selanjutnya ditandai dengan pengembangan pembayaran transportasi yang berbasis akun pada berbagai moda.

Pencapaian digitalisasi transportasi Indonesia saat ini ditandai dengan adanya peluncuran *Mobility as a Service* (MaaS) dan *binding* Kartu Transportasi dengan aplikasi Jaklingko. Selain itu, saat ini juga telah dilakukan penetapan tarif integrasi antar moda DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur serta dilakukan finalisasi model bisnis pembayaran dan strategi implementasi MLFF.

Di sisi lain, digitalisasi moda transportasi masih dihadapkan pada 3 (tiga) tantangan utama, yaitu perbedaan maturity antar moda, integrasi data transportasi, dan kapasitas PJP. Beberapa moda transportasi masih berada pada tahap persiapan implementasi seperti MLFF, Electronic Road Pricing (ERP), dan beberapa program strategis nasional antara lain Kereta Cepat Jakarta Bandung, LRT Jabodebek, dan KA Makassar. Sementara, pada beberapa moda transportasi lainnya telah memasuki tahapan implementasi dan perluasan, hingga pemanfaatan aplikasi seperti integrasi moda, perparkiran, penyeberangan pelabuhan, Buy The Service (BTS), dan transportasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Salah satu flagship digitalisasi program Pemerintah di sektor Transportasi adalah MLFF. Pengembangan MLFF saat ini tengah menuju tahap uji coba dan implementasi bertahap. Melalui implementasi MLFF, pembayaran tariftol akan dilakukan secara otomatis tanpa berhenti dengan memanfaatkan berbagaiinstrumen pembayaran dan Source of Fund (SoF) yang telah dimiliki masyarakat. Pembayaran dilakukan melalui kanal e-OBU secara interkoneksi dan interoperabilitas, yang sebelumnya telah dilakukan binding antara SoF pengguna dengan kanal/e-OBU, baik secara langsung maupun melalui layanan dompet elektronik. Selanjutnya, akan dilakukan proses uji coba piloting yang dilanjutkan dengan implementasi secara bertahap pada akhir sementer I - 2023 dan pada akhirnya dapat terimplementasi secara full-scale pada akhir tahun 2023. Pada MLFF, Bank Indonesia terus berkolaborasi khususnya dalam mengawal dan memfasilitasi implementasi MLFF memberikan quidance terkait model bisnis pembayaran MLFF agar selaras dengan prinsip SP dan ketentuan yang berlaku.

Pada integrasi antar moda transportasi, DKI Jakarta telah menjadi kota percontohan melalui pengembangan Mobility as a Service (MaaS). Di sisi lain, berbagai kota lainnya telah mulai melakukan pengembangan integrasi moda transportasi secara terbatas. MaaS yang telah dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta memungkinkan secara menyeluruh menggunakan layanan smartphone mulai dari merencanakan, memesan moda transportasi, pembelian tiket, dan melakukan perjalanan. Integrasi pada MaaS sudah termasuk pada integrasi fisik, jadwal, hingga tarif transportasi maksimal Rp 10.000, untuk waktu perjalanan dalam kurun waktu 180 menit. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta juga akan meluncurkan fitur ABT yang dapat memberikan personifikasi layanan kepada pengguna transportasi di Jakarta. Pengembangan integrasi moda transportasi ini telah mulai direplikasi di berbagai daerah meski secara terbatas melalui integrasi

fisik, seperti pada layanan DAMRI dengan LRT Palembang serta integrasi antar koridor pada layanan Teman Bus di berbagai kota.

Sementara itu, sebagai salah satu push strategy untuk pengembangan transportasi Pemprov Jakarta juga tengah berencan a menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan di DKI Jakarta. ERP direncanakan untuk beroperasi di 25 ruas jalan dengan panjang jalan total 54 Km. Saat ini, Dishub DKI Jakarta tengah melakukan pengkajian ulang untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan menjadi dasar hukum penerapan penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik atau ERP. Ke depan, masih perlu dikaji kembali untuk solusi model bisnis transaksi pembayaran dan Perda penyelenggaraan ERP yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan target implementasi pada tahun 2024. Sehubungan dengan rencana penerapan ERP, Bank Indonesia akan berperan dalam memberikan masukan terkait model bisnis ERP sesuai dengan prinsip SP, mendorong kesiapan eksosistem SP, membantu penguatan sosialisasi dan edukasi, serta memfasilitasi perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan kepada PJP terkait implementasi ERP.

Selain itu, Kemenhub juga tengah mengembangkan program Teman Bus melalui skema Buy The Service (BTS), yaitu membeli layanan dari operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal. Saat ini Teman Bus telah diimplementasikan di 10 kota besar di Indonesia, yaitu di Bandung, Yogyakarta, Banyumas, Surakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar. Secara nasional, program teman bus telah melayani sebanyak 47 koridor dengan total koridor sepanjang 1.408 kilometer dan memiliki 265 titik integrasi. Pembayaran pada program ini telah dilakukan secara digital dimana pengguna dapat membayar menggunakan kartu UE ataupun QRIS dengan berbagai macam source of fund. Ke depan, program Teman Bus akan melakukan integrasi pembayaran kartu UE untuk perjalanan multi-trip dan multi-city serta menerapkan tarif khusus untuk pelajar, lansia, dan kaum disabilitas.

Pada transportasi penyeberangan, digitalisasi transportasi tengah berfokus pada online ticketing yang saat ini telah diterapkan di beberapa pelabuhan. Pada tahun 2022, telah diterapkan skema online ticketing dan full cashless di 4 pelabuhan utama di bawah PT ASDP (Bakauheuni-Merak, Gilimanuk-Ketapang) dan piloting di pelabuhan Ajibata-Ambarita. Pembelian tiket secara online (online ticketing) dilakukan dengan menggunakan aplikasi ataupun situs Ferizy dengan berbagai opsi pembayaran,

seperti uang elektronik (*server-based*), QRIS, *mobile banking*, hingga melalui berbagai gerai ritel. Pada tahun 2023, ASDP berencana melakukan perluasan penerapan *online ticketing* di Provinsi Kepulauan Riau (Telaga Punggur-Tanjung Uban), Kalimantan Timur (Panajam-Mamuju), NTB (Lembar-Padangbai dan Potatono-Kayangan), dan Kupang (Bolok-Larantuka dan Aimere-Kalabahi). Di sisi lain, ASDP juga telah melakukan kerjasama untuk penjualan tiket dengan *online travel agency* (OTA) yaitu Tiket.comyang akan *go-live* pada awal triwulan II 2023.

Ke depannya, arah pengembangan digitalisas i transportasi akan difokuskan pada layanan berbasis akun atau account-based ticketing (ABT). merupakan skema pembayaran tarif transportasi dimana tiket/akses perjalanannya terhubung dengan akun digital berbasis server. Penggunaan skema ABT akan memberikan berbagai macam potensi manfaat. Pertama adalah kemampuannya untuk diterapkan pada skema harga khusus, seperti program subsidi tarif khusus pada golongan tertentu pada contoh program BTS. Kedua adalah memberikan berbagai macam opsi pembayaran melalui keterhubungan akun dengan server seperti QRIS, e-wallet, dan sebagainya. Ketiga adalah dapat memahami behavior dari pengguna transportasi secara lebih detail terlebih pada layanan berbasis MaaS. Saat ini telah terdapat berbagai inisiasi hingga implementasi awal ABT di beberapa program pemerintah. Salah satunya adalah Jaklingko, yang telah memiliki aplikasi berbasis akun sebagai perantara MaaS pada layanan transportasi di Jakarta. Di sisi lain, terdapat potensi replikasi skema ABT pada program Teman Bus untuk penerapan tarif khusus pada golongan pelajar, lansia, dan disabilitas. Selain itu, ABT juga berpotensi untuk diterapkan pada berbagai layanan transportasi yang berbasis aplikasi, yaitu Ferizy untuk pemesanan tiket Ferry, serta MLFF dan ERP. Selain itu, kedepan juga diharapkan perluasan ekosistem non tunai di sektor transportasi dan tol dapat di replikasi ke berbagai daerah dengan adanya percepatan integrasi tarif dan pembayaran antar moda dengan mengoptimalkan pengembangan ABT.

# Implementasi QRIS dalam Mendukung Digitalisasi Program Pemerintah

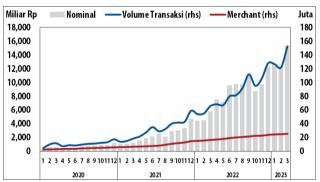
Perkembangan Transaksi QRIS dan Kebijakan Bank Indonesia Terkini

Pembayaran digital melalui kanal QRIS menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan penggunaan QRIS yang mengalami pertumbuhan volume sebesar 31,58% (qtq) pada triwulan I 2023. QRIS telah menjadi *game changer* dalam perluasan ekosistem pembayaran digital salah satunya menjadi pilihan untuk mendukung digitalisasi transaksi pemerintah. QRIS

tidak hanya digunakan untuk pembayaran domestik namun juga telah dikembangkan utnuk menerima pembayaran cross border dalam rangka mendukung pariwisata Indonesia.

Pada triwulan I 2023, volume QRIS tercatat sebesar 400,95 juta transaksi dengan nominal Rp 40,3 T yang 83% transaksinya merupakan transaksi UMKM. Di sisi lain jumlah merchant dan jumlah pengguna QRIS juga terus meningkat. Jumlah merchant QRIS tercatat sebesar 25,37 juta dengan 91% merupakan merchant kategori UMKM. Sedangkan untuk pengguna QRIS telah mencapai 32,41 juta pengguna. Pencapaian ini didukung oleh 93 PJP. Dengan pencapaian yang terus tumbuh positif, jumlah pengguna QRIS dan volume QRIS pada akhir 2023 mencapai total 45 juta pengguna dan 1 miliar transaksi.

Berbagai kebijakan Bank Indonesia terkait QRIS juga untuk mendukung Pemulihan Ekonomi **Nasional** pasca terjadinya pandemi. Pertama. penyesuaian limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta/transaksi menjadi Rp10 juta/transaksi untuk mengakomodir use case transaksi dengan nominal besar, serta mendukung digitalisasi di daerah dan transaksi Pemerintah. Kedua, penetapan MDR 0% bagi merchant mikro sehingga lebih efisien sampai dengan Juni 2023. Ketiga, pengembangan fitur dan model bisnis QRIS secara berkelanjutan bersama industri seperti QRIS Transfer, Tarik, dan Setor serta QRIS cross border.



Grafik III.4. Perkembangan transaksi dan merchant QRIS

Perluasan ORIS akan terus dilakukan baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran untuk meningkatkan transaksi QRIS dengan didukung inovasi kebijakan dan pengembangan fitur. Strategi perluasan QRIS dibagi menjadi 3 pilar yaitu pilar Sinergi Kebijakan Nasional, pilar Edukasi dan Kampanye, dan pilar Ekspansi. Pada pilar pertama akan dilakukan perluasan melalui sin ergi dengan program nasional seperti P2DD, Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia. Kemudian perluasan QRIS melalui pilar ini juga dilakukan melalui pemberian Award QRIS, sinergi bersama PJP dan E-Commerce, Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga, serta penguatan infrastruktur melalui program BAKTI.

Pada pilar edukasi dan kampanye, perluasan dilakukan melalui sinergi dengan program dari Bank Indonesia seperti Fekdi, ISEF, KKI, dan Fesyar. Selain itu edukasi dan sosialisasi juga dilakukan melalui program pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia dan Presidensi ASEAN 2023. Di sisi lain, edukasi dan sosialisasi juga dilakukan melalui Kantor Perwakilan Daerah Bank Indonesia seperti melalui Pekan QRIS Nasional, *Showcase*, Pentas Seni, kompetisi, dan melalui kegiatan FGD dan Seminar.

Pada pilar Ekspansi, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan menjalankan program Pasar/Pusat Belanja PAKAI QRIS, yaitu pemasangan QRIS pada para pedagang dan *merchant* di pasar dan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. Strategi ekspansi juga mencakup perluasan QRIS ke komunitas prioritas, pengembangan fitur dan perluasan kerja sama QRIS, dan program onboarding pengguna dan merchant QRIS.

Selain perluasan pada QRIS domestik, perluasan QRIS Antarnegara juga terus dilakukan. Pada tahun 2022 QRIS Antarnegara Indonesia dengan Thailand telah diimplementasikan. Jumlah transaksi outbound mencapai 14.555 transaksi dengan nominal mencapai Rp8,54 M. Sedangkat untuk transaksi inbound mencapai 492 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp114 Juta.

#### Implementasi QRIS pada Program Pemerintah

Perluasan QRIS sebagai inovasi yang mengedepankan interkoneksi dan interoperabilitas juga telah diimplementasikan pada tiga program digitalisasi Pemerintah, yaitu bansos, transaksi Pemda, dan transportasi. Pada program digitalisasi Bansos, QRIS menjadi moda transaksi utama dengan model bisnis yang telah diuji coba untuk memastikan keandalan QRIS dalam penyaluran Bansos.

Pada program digitalisasi transaksi Pemda, QRIS telah digunakan oleh 346 Pemda di seluruh Indonesia untuk berbagai *use case* penerimaan transaksi Pemda, antara lain dalam pembayaran retribusi parkir, Samsat, serta Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sementara itu, pada digitalisasi transportasi, QRIS telah digunakan untuk pembayaran parkir, pembelian tiket transportasi, pembayaran ongkos transportasi modern seperti taksi, maupun transportasi tradisional seperti andong, pete-pete, dan angkot. Ke depan, perluasan pemanfaatan QRIS MPM akan dilakukan untuk integrasi moda transportasi yang *interoperable* dan pengembangan penggunaan QRIS CPM untuk moda transportasi.

#### Asesmen 31+2K

Sebagai upaya monitoring digitalisasi, asesmen dengan prinsip 3I+2K (Informasi dan Data, Infrastruktur, Implementasi, Koordinasi dan Ketentuan) terus dilakukan pada masing-masing program digitalisasi untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti.

## Digitalisasi Bantuan Sosial

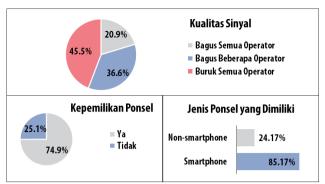
Dalam rangka mendukung implementasi digitalisasi bansos, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) melakukan survei kepada KPM yang diidentifikasi melalui asesmen 3I+2K. Hasil survei tersebut menyimpulkan bahwa digitalisasi bansos perlu didukung dengan upaya peningkatan kualitas data, pemenuhan ketersediaan infrastruktur, baik Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) dan Sistem Pembayaran (SP), peningkatan literasi KPM, pelaksanaan koordinasi yang intensif, serta penyediaan ketentuan sebagai payung hukum untuk mewujudkan pemenuhan aspek 6T (Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi).

#### Informasi dan Data

Dalam mendukung transformasi digitalisasi bansos, ketersediaan data yang clean and clear menjadi salah satu prasyarat untuk pemenuhan aspek tepat sasaran. Namun demikian, terdapat 2 (dua) isu terkait informasi dan data dalam penyaluran bansos, yaitu basis data dan ekosistem data. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengembalian data KPM yang masih cukup banyak oleh bank penyalur kepada pemilik program, yakni sekitar 133 ribu KPM. Alasan pengembalian tersebut diantaranya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak ditemukan, nama penerima manfaat berbeda dengan data Dukcapil, dan sebagainya. Kendala ini secara umum dihadapi oleh hampir seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme perolehan basis data yang valid secara efisien, salah satunya melalui pengembangan konsep Pusat Pemeta Data Terintegrasi (PPDT).

#### Infrastruktur

Ketersediaan jaringan sinyal yang berkualitas merupakan aspek penting dalam implementasi digitalisasi bansos. Hasil survei menunjukkan sebagian responden KPM yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) menyatakan bahwa kualitas jaringan sinyal di wilayah tersebut berkategori buruk untuk seluruh operator (42,5%). Hal ini membuat penyaluran bansos yang menggunakan mesin EDC serta kanal digital lainnya menjadi tidak optimal.



**Grafik III.5.** Persentase Kualitas Sinyal dan Kepemilikan Jenis Ponsel KPM (Berdasarkan Hasil Survei)

Dari sisi kepemilikan telepon seluler (ponsel), sebanyak 74,9% responden KPM telah memiliki ponsel namun belum seluruhnya berjenis *smartphone* yang dapat menunjang aktivitas transaksi keuangan digital. Ditinjau penggunaannya, penggunaan ponsel oleh KPM untuk layanan keuangan masih terbatas sehingga diperlukan peningkatan *awareness* dan literasi KPM melalui sosialisasi layanan keuangan digital.

#### *Implementasi*

Implementasi penyaluran bansos non tunai saat ini secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat kendala umum yang dihadapi, seperti lupa PIN, kendala sinyal, KKS terblokir, dan proses pencairan dana tidak masuk ke rekening KPM. Secara khusus kendala dana tidak masuk ke rekening KPM disebabkan mekanisme *freeze* dana bantuan karena berbagai faktor, diantaranya KPM menerima bantuan ganda, KPM telah dianggap mampu, serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belum diterbitkan Pemilik Program.

#### Koordinasi

Penyaluran bansos perlu didukung dengan pelaksanaan koordinasi yang intensif dan sinergi berbagai pihak, khususnya Tim Pengendali BSNT. Tim yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta beranggotakan 21 K/L, termasuk Bl, memiliki fokus dan prioritasnya masing-masing dalam penyaluran bansos, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam aspek koordinasi. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi, diantaranya:

- 1) Peran pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran bansos belum optimal;
- Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah terkait perubahan penyalur dan mekanisme salur belum berjalan baik;
- 3) Ketidakjelasan perencanaan penyaluran oleh pemilik programsehingga berdampak pada kesiapan penyalur;
- 4) Komunikasi pusat dan daerah terkait pengkinian data KPM belum optimal; serta
- 5) Ketersediaan pendamping KPM belum memadai.

#### Ketentuan

Dalam rangka memastikan penyaluran bansos yang memenuhi prinsip fairness serta aspek tata kelola yang baik, implementasi penyaluran bansos perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penyaluran bansos perlu didukung ketersediaan ketentuan yang mengakomodir kebutuhan penyaluran secara digital, antara lain (1) amandemen Peraturan Presiden, yakni Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos secara Non Tunai; (2) amandemen Peraturan Menteri, yakni Permensos dan Permenkeu; (3) amandemen Perdirjen di Kemensos, serta (4) penyesuaian Pedoman Umum terkait mekanisme penyaluran non tunai dan tunai.

# Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Secara garis besar, tantangan digitalisasi transaksi Pemda masih dihadapkan pada berbagai kendala utamanya Aspek Infrastruktur, Aspek Koordinasi dan Aspek Ketentuan.

#### Informasi dan Data

Pada Aspek Informasi dan Data, tingkat pelaporan **ETPD** akurasi data melalui menunjukkan peningkatan. Pada semester II - 2022, seluruh Pemda (100%) telah berpartisipasi melakukan pengisian survei Indeks ETPD melalui SIP2DD secara lengkap. Namun demikian, akurasi pengisian data yang dilakukan secara self assessment oleh pemda masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan pengisian survei Indeks ETPD semester II – 2022, masih terdapat 60 pemda (11, 1%) Pemda yang hasil pelaporannya masih memerlukan verifikasi. Secara spasial, akurasi pelaporan pemda di wilayah Jawa merupakan yang tertinggi (97,5% pemda) dibanding wilayah lainnya. Di sisi lain masih terdapattantangan terkait ketersediaan data dan mekanisme verifikasi data untuk transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah.

#### Infrastruktur

Berdasarkan hasil pemetaan pada IETPD, kondisi infrastruktur jaringan telekomunikasi masih relatif belum merata dan menjadi kendala yang muncul di 62% pemda (337 Pemda). Jangkauan jaringan 4G di wilayah Sulampua dan Kalimantan masih perlu ditingkatkan, bahkan masih terdapat 8% Pemda di wilayah Sulampua yang belum terjangkau jaringan 4G. Kondisi infrastruktur telekomunikasi tersebut juga turut berdampak pada tahap digitalisasi pemda, yang mana terdapat 8,5% pemda (terdiri dari 45 pemda di tahap Berkembang dan 1 pemda di tahap Inisiasi), cenderung persisten berada pada tahap digitalisasi yang rendah karena permasalahan struktural seperti kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

Di sisi lain, infrastruktur SP perbankan yang diukur dari ketersediaan berbagai kanal SP nontunai, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pada posisi semester II – 2022, ketersediaan keriasama pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui e-commerce telah mencapai 60,3% (327 pemda), melalui digital banking mencapai 89,1% (483 pemda), dan pemanfaatan QRIS telah mencapai 74% (401 pemda). Pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2021 yang diimplementasikan oleh 346 pemda (63,8%). Secara spasial, pemanfaatan QRIS untuk transaksi pemda masih perlu didorong, khususnya di wilayah Sulampua dan Balinusra, dimana tingkat pemanfaatan QRIS masih kurang dari 60% pemda. Sementara itu, upaya integrasi sistem keuangan pemda dan Bank RKUD melalui CMS juga terus dilakukan oleh Pemda. Pada tahun 2022 tercatat 72,7% atau 394 sistem keuangan pemda telah terintegrasi dengan CMS.

#### *Implementasi*

Implementasi ETPD secara umum masih dihadapkan pada berbagai tantangan, utamanya terkait minat masyarakat dan infrastruktur TIK. Sebanyak 88% pemda (475 pemda) menyatakan minat masyarakat sebagai kendala utama dalam implementasi ETPD, diikuti oleh kendala infrastruktur TIK. Kedua kendala utama ini secara konsisten muncul di berbagai wilayah dan tahapan indeks ETPD. Di samping itu, kendala terkait ketersediaan infrastruktur perbankan dan kompetensi SDM Pemda juga relatif tinggi, khususnya pada pemda yang berada di tahap Maju. Sementara kendala terkait komitmen Pemda banyak ditemui pada Pemda di tahap inisiasi dan berkembang. Sebagai contoh, sebanyak 67% Pemda tahap berkembang di wilayah Sumatera dan 63% Pemda tahap berkembang di Sulampua mencatat komitmen Pemda sebagai kendala utama dalam implementasi ETPD.

Dalam upaya meningkatkan implementasi ETPD tersebut, KPwDN terus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi edukasi dan capacity building untuk mendukung kapabilitas Pemda maupun literasi masyarakat. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat juga dilakukan melalui penyelenggaran beberapa kegiatan seperti Gebyar Samsat di Provinsi Bali untuk mendorong pembayaran PKB dan BBNKB melalui kanal non tunai. Upaya peningkatan pembayaran non tunai pada PBB juga dilakukan antara lain dengan memberikan insentif bagi wajib pajak pada hari tertentu. Selain itu, edukasi pembayaran melalui QRIS juga dilakukan melalui berbagai media dan konten digital.

#### Koordinasi

Pada Aspek Koordinasi, penyelenggaraan high level meeting (HLM) yang dipimpin kepala daerah masih relatif terbatas. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 48% pemda belum pernah menyelenggarakan HLM, 40% Pemda menyelenggarakan HLM sebanyak satu kali, dan hanya 12% pemda yang menyelenggarakan HLM lebih dari dua kali. Di sisi lain, koordinasi pemda dengan pihak lainnya untuk memperluas kanal pembayaran non tunai digital, seperti melalui kerjasama e-commerce, menunjukkan peningkatan. Secara nasional, kerjasama dengan e-commerce meningkat dari 234 Pemda di tahun 2021 menjadi 327 pemda di tahun dengan capaian tertinggi di wilayah Jawa. Peningkatan kolaborasi pemda dan e-commerce tidak terlepas dari peran BPD yang terus melakukan ekspansi untuk mengakomodir berbagai instrumen pembayaran yang dimiliki masyarakat.

#### Ketentuan

Sebagian besar pemda telah memiliki regulasi daerah untuk mendukung implementasi ETPD secara umum, namun regulasi daerah untuk implememtasi KKPD Domestik perlu diperkuat. Sebanyak 90% pemda telah memiliki regulasi untuk mendukung implementasi ETPD, dengan capaian secara spasial tertinggi berada di wilayah Jawa. Sementara di wilayah Sulampua, masih terdapat 19% pemda yang belum memiliki regulasi daerah terkait ETPD. Di sisi lain, ketersediaan regulasi yang secara khusus mengatur implementasi KKPD Domestik masih sangat terbatas. Saat ini hanya 14% Pemda yang telah menerbitkan perkada terkait KKPD Domestik. Penerbitan Perkada ini perlu didorong, mengingat diperlukannya landasan hukum dalam implementasi KKPD Domestik sebagai salah satu program prioritas di daerah.

# Digitalisasi Transportasi

Asesmen aspek 3I+2K pada digitalisasi transportasi dilakukan melalui survei kepada 46 KPwDN Bl. Beberapa isu yang mengemuka dalam aspek 3I+2K antara lain terkait data yang scattered di masing-masing pengelola transportasi maupun otoritas, ketersediaan infrastruktur serta pendukung pembayaran non tunai, serta dukungan regulasi di daerah.

#### Informasi dan Data

Dalam implementasi elektronifikasi transportasi beberapa hal yang mengemuka adalah masih terbatasnya integrasi fisik, perlunya sentralisasi pada proses settlement, dan ketersediaan data untuk account profiling di sektor transportasi. Pada sektor transportasi secara umum, wilayah di Jabodetabek dan Jawa Timur telah dapat melakukan integrasi pengelolaan informasi dan data

secara terintegrasi melalui lembaga *Electronic Fare Collection* (EFC), seperti PT Jaklingko Indonesia. Namun demikian, pada daerah lain integrasi transportasi yang telah dilakukan masih terbatas pada modafisik /infrastruktur. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya *awareness* dan komitmen Pemda dalam pengembangan basis data.

Sementara pada sektor jalan tol, saat ini pengelolaan data dilakukan oleh 49 BUJT dibantu PJP PIAS sebagai *Payment Gateway* dengan data berada di masing-masing BUJT. Setelah implementasi MLFF, pengelolaan data dan payment akan dilakukan secara terpusat melalui *Electronic Toll Collection* (ETC) yakni PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana yang telah ditunjuk oleh Kemen PUPR.

#### Infrastruktur

Infrastruktur yang kurang memadai perlu mendapat perhatian lebih untuk dapat mendukung digitalisasi sektor transportasi. Hal ini antara lain dukungan infrastruktur SP, lokasi top-up uang elektronik, dan jaringan yang belum merata (ditandai dengan masih terdapatnya area blankspot) masih menjadi salah kendala dalam implementasi elektronifikasi transportasi di daerah, terutama di Sulampua. Sebagai contoh, stasiun KA yang terdapat di wilayah tersebut banyak yang berada pada lokasi blankspot.

#### *Implementasi*

Implementasi elektronifikasi transportasi telah dilakukan di berbagai daerah dengan instrumen atau kanal pembayaran nontunai yang paling banyak disediakan adalah QRIS dan UE chip based. Hal tersebut menunjukkan secara umum daerah memiliki potensi perluasan kanal non tunai termasuk peralihan menuju pembayaran digital. Lebih lanjut, di wilayah Jawa, pembayaran transportasi sudah beralih kepada berbasis akun dengan pemanfaatan aplikasi. Hal ini akan mendukung pengembangan ABT sebagaimana arah pengembangan digitalisasi tansportasi kedepan.

#### Koordinasi

Dalam rangka inisiasi SP nontunai pada layanan moda transportasi serta melakukan monitoring program elektronifikasi transportasi di daerah, **upaya koordinasi terus diperkuat dengan berbagai pihak, antara lain Pemda, otoritas, perbankan, operator transportasi, penyedia sistem IT**. Namun demikian, koordinasi dengan *stakeholder* perlu terus didorong untuk mengakselerasi implementasi pembayaran nontunai di sektor transportasi.

#### Ketentuan

Ketersediaan regulasi daerah terkait elektronifikasi layanan moda transportasi di wilayah kerja KPwDN BI masih relatif rendah, dimana hanya 7 KPwDN dari total 46 KPwDN BI yang menyatakan telah terdapat ketentuan Pemerintah Daerah terkait elektronifikasi (pembayaran nontunai) layanan moda transportasi. Ketentuan/regulasi sangat penting sebagai landasan hukum dalam implementasi non tunai didaerah yang dapat diikuti semua pihak. Untuk itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan K/L di level pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mendorong penerbitan regulasi yang dapat mendukung penerapan pembayaran nontunai di sektor transportasi.

## Rencana Ke Depan

Berdasarkan perkembangan dan asesmen 3I+2K pada masing-masing program digitalisasi, telah disusun beberapa substansi koordinasi baik jangka pendek (2023) maupun menengah (2024-2025) untuk mempercepat implementasi digitalisasi di setiap program.

#### Digitalisasi Bantuan Sosial

Dalam rangka mendorong implementasi digitalisasi bansos secara bertahap dan terukur sesuai dengan peta jalan digitalisasi bansos yang telah dicanangkan oleh Tim Pengendali BSNT, BI akan fokus dalam 3 (tiga) substansi koordinasi berikut:

- 1) Mendorong kesiapan G2P 4.0 melalui uji coba model bisnis secara bertahap di berbagai *use case*;
- Mendorong pengembangan Pusat Pemeta Data Terintegrasi (PPDT) untuk mendukung efisiensi dan integrasi data bansos; dan
- Mengawal ekosistem SP dalam penyaluran bansos, a.l. PJP, sistem agen LKD/Merchant.

#### Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Pencapaian yang masih berproses terus akan dikuatkan dengan adanya langkah strategis ke depan serta substansi koordinasi yang menjadi pondasi keberlangsungan digitalisasi transaksi Pemda dalam waktu mendatang, yakni:

- 1) Melanjutkan pelaksanaan Rakornas dan *Championship* serta program prioritas P2DD lainnya;
- Meningkatkan kualitas IETPD secara berkelanjutan sebagai tools monitoring ETPD termasuk enhancement pada fitur SIP2DD;

- 3) Mendorong peningkatan peran Bank RKUD sebagai agent of development; dan
- 4) Mendorong percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah Domestik (a.l. penerbitan perkada, fitur SIPD, dan kapasitas penerbit).

#### Digitalisasi Transportasi

Berdasarkan asesmen 3I+2K serta urgensi implementasi, maka terdapat tiga substansi koordinasi yang diusulkan untuk percepatan digitalisasi transportasi, yaitu:

- 1) Mendorong penerapan prinsip SP dalam pengembangan model bisnis digitalisasi transportasi.
- 2) Mendorong kesiapan ekosistem SP dalam implementasi digitalisasi transportasi.
- 3) Mendorong perluasan implementasi *digital payment* di ekosistem sektor transportasi yang didukung dengan sistem informasi *database* terintegrasi.

#### Substansi Umum

Substansi koordinasi ketiga pilar digitalisasi di atas akan didukung lima aspek substansi umum yaitu:

- Percepatan Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) melalui komitmen dan prioritas Nasional pada alokasi APBN/ABPD;
- 2) Mendorong penguatan landasan hukum untuk implementasi digitalisasi;
- Mendorong ketersediaan dan peningkatan kualitas data/informasi:
- Memperkuat koordinasi melalui penguatan kelembagaan dan komunikasi Pusat-Daerah;
- 5) Mempercepat implementasi digitalisasi pembayaran dengan mempertimbangkan kesiapan dan karakteristik daerah; dan
- Mendorong pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi program Pemerintah baik di Pusat maupun daerah.

Melalui sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga dan otoritas terkait, pelaku industri dan masyarakat, berbagai upaya percepatan digitalisasi melalui substansi koordinasi masing-masing program di atas diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi dan menciptakan efisiensi ekonomi nasional.

# Pengembangan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik

Penggunaan kartu kredit di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat telah diinisiasi di tingkat pusat sejak Keuangan Nomor penetapan Peraturan Menteri 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 97/PMK.05/2021. Penggunaan KKP dimaksudkan untuk pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN dan digunakan untuk keperluan belanja barang operasional dan belanja modal, serta belanja perjalanan dinas jabatan. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri juga mendorong penggunaan kartu kredit pada perangkat daerah melalui penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan APBD. Pembayaran secara non tunai melalui fasilitas KKPD dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perkembangannya, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersinergi untuk memfasilitasi penerbitan kartu kredit pemerintah, baik pusat dan daerah (KKP dan KKPD), dengan skema pemrosesan secara domestik. Pengembangan KKP dan KKPD Domestik dilakukan dalam rangka mendukung aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan selaras dengan arahan Presiden RI melalui Inpres No. 2 Tahun 2022, yaitu menggunakan transaksi non-tunai untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), termasuk dalam ekosistem pembayaran.

Di samping itu, pengembangan skema pembayaran domestik turut mengatasi tantangan penyelenggaraan kartu kredit di Indonesia saat ini, yang mana mayoritas transaksi kartu kredit dilakukan di domestik, sementara penyelenggaraannya didominasi prinsipal internasional sehingga pemrosesan dan penyimpanan data dilakukan di luar negeri. Hal ini berimplikasi pada skema harga yang tinggi serta keamanan dan kedaulatan data yang tidak berada dalam kendali Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan KKP dan KKPD Domestik juga searah dengan pengembangan sistem pembayaran pada BSPI 2025, yang mana transaksi pemerintah juga menjadi salah satu segmen prioritas.

Sebagai tahap awal, telah diluncurkan KKP Domestik melalui fitur QRIS oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo,

bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Keuangan pada 29 Agustus 2022 lalu. Pengembangan yang sama juga dilakukan di tingkat perangkat daerah, melalui pengembangan KKPD Domestik yang dilakukan bersama BPD. Selanjutnya, untuk melengkapi KKP Domestik fitur ORIS. tengah mengembangkan KKP dan KKPD Domestik berbentuk fisik kartu, dengan rencana peluncuran pada Mei 2023. Dalam tahap pengembangan lanjutan, akan dikembangkan fitur pembayaran online untuk memfasilitasi transaksi di platform pemerintah (Toko Daring) pada triwulan III 2023.

Sejak peluncurannya hingga saat ini terdapat tiga Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, dan BNI) yang telah menyediakan layanan KKP Domestik dan 3 BPD (BPD Bali, BPD DKI Jakarta, dan BJB) yang telah mendapatkan izin untuk menerbitkan layanan KKPD Domestik dengan fitur QRIS. Masih minimnya penyediaan KKPD Domestik oleh BPD tersebut disebabkan sebagian besar BPD belum memiliki izin sebagai penerbit kartu kredit. Sebagai solusi, pengembangan layanan KKPD Domestik oleh BPD tidak hanya dapat dilakukan melalui pengembangan mandiri, namun juga dapat ditempuh melalui white label (managed service) dengan penyedia solusi atau mekanisme cobranding dengan penerbit kartu kredit eksisting.

Sementara dilihat dari sisi perangkat daerah, hasil survei monitoring yang dilakukan Bank Indonesia mencatat sebanyak 18 pemerintah daerah telah mengimplementasikan KKPD Domestik dengan fitur QRIS, yang terdiri dari 3 pemerintah provinsi, 3 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten. Beberapa pemerintah daerah tersebut antara lain Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kota Sabang, Medan, Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Donggala. Salah satu penyebab terbatasnya implementasi KKPD Domestik di daerah adalah belum tersedianya regulasi (Perkada) di tingkat daerah. Hingga saat ini hanya 46 Pemda (8,5%) yang telah memiliki Perkada terkait KKPD Domestik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi di tingkat daerah untuk terus mengakselerasi implementasi KKPD Domestik.

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia akan terus mengawal implementasi KKP dan KKPD Domestik bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, PJP, ASPI, dan perangkat daerah agar KKP dan KKPD Domestik dapat segera digunakan sebagai alternatif pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah. Hal ini juga selaras dengan arahan Presiden RI yang meminta BUMN dan Pemda memanfaatkan belanja pemerintah melalui P3DN agar memberikan dampak pada pergerakan ekonomi.

# TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Solikin M. Juhro

#### **Koordinator Penyusun** IGP Wira Kusuma M. Abdul Majid Ikram

#### **Tim Penulis**

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Grup Sektoral dan Regional

Asrianti Mira Anggraeni Oki Hermansyah Ajeng Ratna Kartina Ide Mahendra Sheila Reswari Irham Ilmanel Abdinni Muhammad Arifian Adin Refdamas Dwiaji Wisnumurti Archie Flora Anisa

Grup Ekonomi Makro

Tri Kurnia Ayu Suryaningsih

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Grup SP Ritel & PUR

Yosamarta
Primitiva Febriarti
Ginanjar
Adhy Ramawan Putra
Meita Elshinta Siagian
Reksa Wiratama
Pandu Anggara
I Putu Medagia A.

Kantor Perwakilan BI Prov. Sumatera Utara

Erinetta Lomoria Fika Akhmad

Kantor Perwakilan BI Prov. Jawa Timur

Gandhiano Dwi Putera Ramdha Dien Azka

Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Selatan

Septo Nainggolan Steven Theja

Kantor Perwakilan BI Prov. Bali

Imanda Mulia Rahman Bagas Naufal Prayitno

Kantor Perwakilan BI Prov. Sulawesi Selatan

Dita Khadijah Erdi Fiat Gumilang



Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

BANK INDONESIA Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Grup Sektoral dan Regional Ph. 021-2981 8119, 2981 8868

Fax. 021-3452 489, 231 0553

